

Volume 1, Nomor 1, November 2024

EXCLUSIVE NEWS

BERKATA DENGAN FAKTA

Terkait Dugaan Pungli di Sekolah,
PPWI Inhil Soroti Sikap Kadisdik dan Pemkab Inhil yang Memble



Kronologis Awal Penembakan
Oleh Kabagops Polres Solok Selatan
Terhadap Kasat Reskrim Solok Selatan



Panglima TNI Dampingi
Menkopolkam Monitoring Pilkada
Serentak Tahun 2024



Kompas Siarkan Berita Menyesatkan
tentang Konservasi Badak Jawa,
Berikut Keterangan Balai TNUK

PIMPINAN REDAKSI

TOMI, S.Pd.,M.E.

REDAKTUR & EDITOR

WERDA NINGSIH, S.Pd

LAY OUT

NAJWA AT. THOMIMY

MEDIA

DAYANG SURTILAH

ADMIN

MOHAMMAD SULTHAN

KEPALA KONTRIBUTOR

FATIHAH AT. THOMIMY

KONTRIBUTOR

UMI WAWA

ABI AHMAD

JIHAN ANNISA

Volume 1, Nomor 1, November 2024

EXCLUSIVE NEWS 
BERKATA DENGAN FAKTA

<https://exclusivenews.tomsbook.co.id>

Diproduksi di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat,
November 2024

Oleh:

CV. Tom'S Book Publishing

Jl. Padat Karya No. 12 Kelurahan Bunut
Kecamatan Kapuas – Kabupaten Sanggau
Kalimantan Barat – Indonesia

Contact Person +62 85752078799

Email: tomsbooks.publishing@gmail.com

Website : <http://tomsbook.co.id>

EXCLUSIVE NEWS

VOLUME 1, NOMOR 01, NOVEMBER 2024

DAFTAR ISI

1. Forum Wartawan Dan LSM Kalimantan Barat Gelar Pertemuan Bahas Optimalisasi Ekonomi Kalbar 3 – 5
2. Tiket Murah untuk Jurnalis: PT. Mugi Jaya Wasa Dorong Peran Pers dalam Perdamaian Dunia 6 – 7
3. BREAKING NEWS:
Atas Perintah Raja Maroko, Putra Mahkota Moulay El Hassan Sambut Presiden Tiongkok di Casablanca 8 – 10
4. Terkait Kasus Dedengkot Pungli Saruji, Bupati Inhil Diminta Bertindak Tegas, Sejumlah Pihak Perlu Diperiksa 11 – 13
5. Pj. Bupati Inhil Copot Jabatan Kepala SMPN 1 Tembilahan Hulu .. 14
6. Kepemimpinan Pj Bupati Erisman Yahya Dianggap Amburadul, Ketua Umum DPN PPWI Dampingi DPC PPWI Inhil Surati Mendagri 15 – 17
7. PPWI Inhil Menyoroti Sikap Kadisdik dan Pemkab Inhil Terkait Dugaan Pungli di Sekolah 18 – 20
8. Terkait Dugaan Pungli di Sekolah, PPWI Inhil Soroti Sikap Kadisdikdan Pemkab Inhil yang Memble 21 – 23
9. 187 Perwira Lulus Dikreg Sesko TNI Ke-52 Siap Hadapi Tantangan Global dan Nasional 24 – 26
10. Wakapuspen TNI Buka Rakor PPID Mabes TNI TA 2024 .. 27 – 28
11. Panglima TNI: TNI Kerahkan 169 Ribu Personel dan Alutsista, Amankan Pilkada Serentak 2024 29 – 30
12. Panglima TNI Dampingi Menkopolkam Monitoring Pilkada Serentak Tahun 2024 31 – 32
13. Kasatreskrim Polres Solok Selatan Tewas Ditembak Rekan Sesama Polisi 33 – 34
14. KronologisAwalPenembakan Oleh Kabagops Polres Solok SelatanTerhadap Kasat Reskrim Solok Selatan 35 – 36

15. Lecehkan Media Grassroot, Wilson Lalengke Laporkan Kapolres Pringsewu Ke Divisi Propam Polri 37 – 41
16. Restorative Justice Hasilkan Perdamaian, PPWI Cabut Gugatan Prapid terhadap Kapolri 42 – 44
17. Kesal Di-PHP, Wilson Lalengke Propamkan Penyidik Dittipidkor Bareskrim Polri 45 – 48
18. Bercermin dari Wilson Lalengke, Pemimpin Sejati yang Melindungi Anggota tanpa Batas Oleh: Muhammad Adam, S.H. .. 49 – 52
19. Indonesia Negerinya Polisi, Rakyat Numpang Nonton Oleh: Wilson Lalengke 53 – 55
20. PPWI Ucapkan Selamat kepada Haji Herman sebagai Bupati Terpilih Inhil 2025-2030 56 – 57
21. Kompas Siarkan Berita Menyesatkan tentang Konservasi Badak Jawa, Berikut Keterangan Balai TNUK 58 – 62
22. Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke Angkat Bicara Terkait Ancaman Pembunuhan Terhadap Tim PT Berita Istana Negara 63 – 64
23. Pelatih Fisik Persatuan Gulat Indonesia (PGSI) Mengadu ke Ketum PPWI, Terkait Bonus Pelatih yang Tidak Dibayar .. 65 – 68
24. Nelayan Kalimantan Barat Desak Keringanan Retribusi di Tengah Cuaca Buruk 69 – 70



Salam Literasi,

Telah satu dekade Penerbit CV. Tom’S Book Publishing berkarya dalam penerbitan buku. Kini Penerbit CV. Tom’S Book Publishing meluncurkan Majalah Exclusive News sebagai media edukasi bagi masyarakat. Semoga kehadiran Majalah Exclusive News ini dapat diterima oleh masyarakat dan bermanfaat.

Demikian, Salam Literasi.

Dewan Redaksi



Exclusive News-Entikong.

Dalam rangka mengoptimalisasi perekonomian daerah Kalimantan Barat, Forum Wartawan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kalimantan Barat menggelar pertemuan bertema “Berperan Dalam Mengoptimalisasi Kemajuan Perekonomian Di Daerah Kalbar khususnya Di Bidang UMKM, Ekspor Impor, Pertambangan dan Perkebunan”, pada Minggu, 17 November 2024, di Gedung Wisma Nusantara PLBN Entikong, dihadiri sekitar 150 orang dari berbagai daerah di Kalimantan Barat, dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pemerintah, TNI, Polri, serta sektor swasta.

Pertemuan ini dihadiri sejumlah tokoh penting sebagai narasumber yaitu Komandan Distrik Militer (Dandim) 1204/Sanggau Letkol Inf. Subandi, Kasi Humas Polres Sanggau Iptu Keken Sukendar, Kapolsek Entikong AKP Sabja, Kemenkumham Kalbar Riswandi, Bank Kalbar unit Entikong Moh Makmun dan beberapa tokoh penting di Kalbar.

Forum ini dibuka oleh Komandan Distrik Militer (Dandim) 1204/Sanggau, Letkol Inf. Subandi, yang dalam sambutannya menyampaikan pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam memajukan perekonomian daerah. Subandi berharap pertemuan ini memberikan dampak positif terhadap perekonomian warga baik melalui peningkatan kunjungan wisata, aktivitas perdagangan lokal maupun peluang kerja.

Selain itu Subandi juga menekankan peran forum ini dalam mempromosikan perkembangan wilayah perbatasan. Menurutnya kehadiran teknologi informasi yang kini semakin mudah diakses dapat digunakan untuk mempublikasikan potensi ekonomi lokal. Ia juga mengapresiasi peran wartawan dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat.

Dalam kesempatan ini, Subandi juga menyoroti pentingnya peran wartawan dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat. Sebagai contoh, ia menyebutkan peran media dalam membantu penanggulangan bencana banjir di Sosok beberapa waktu lalu.

Informasi yang cepat dan akurat dari media, menurutnya, berhasil menggerakkan bantuan kepada warga yang terdampak banjir. Kolaborasi antara wartawan, pemerintah desa dan masyarakat sangat penting, terutama dalam situasi darurat seperti bencana. Melalui media informasi, bantuan dapat tersalurkan secara tepat sasaran.

Berikutnya, Subandi juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas keamanan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada 27 November 2024. Dengan tegas ia menyatakan bahwa TNI dan Polri, bersama seluruh komponen bangsa lainnya, berkomitmen menjaga stabilitas agar agenda nasional ini berjalan dengan aman dan lancar.

Selanjutnya, dalam sambutannya, perwakilan dari Kemenkumham Kalimantan Barat, Plh. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Riswandi, menyampaikan harapan agar forum ini menjadi ajang pertukaran informasi dan penguatan kolaborasi antar pihak. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya berhenti di sini, tetapi berlanjut dalam forum-forum berikutnya. Hal ini penting untuk membangun kebersamaan demi memajukan daerah.

Kemudian perwakilan Bank Kalbar, Mohammad Makmun, menyoroti peran sektor UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal. Ia menjelaskan upaya bank dalam memberikan dukungan berupa pembiayaan mikro dan kredit usaha rakyat (KUR) untuk meningkatkan kapasitas UMKM di Kalimantan Barat. Ia berharap UMKM bisa naik kelas, sehingga mampu bersaing di pasar nasional dan internasional.

Selanjutnya, Kasi Humas Polres Sanggau, Iptu Keken Sukendar, menyampaikan mengenai salah satu peran dan tugas Polri dalam mengayomi dan melindungi masyarakat. Ia menegaskan komitmen Polri dalam menjaga situasi tetap kondusif agar kegiatan masyarakat berjalan lancar, apalagi saat menjelang Pilkada serentak yang tidak lama lagi akan dilaksanakan, termasuk juga dalam mendukung program-program peningkatan ketahanan pangan dan ekonomi.

Acara ini diakhiri dengan diskusi interaktif yang membahas strategi pengembangan ekonomi lokal, termasuk peluang dan tantangan dalam sektor ekspor-impor, UMKM, pertambangan, dan perkebunan. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan dari para peserta untuk bersama-sama memperkuat sinergi lintas sektor guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kalimantan Barat khususnya di kabupaten Sanggau. Para peserta juga berharap hasil pertemuan ini dapat menjadi rekomendasi kebijakan yang berdampak nyata bagi kemajuan daerah. (TOMI)

---oOo---



Exclusive News -Jakarta, 11 November 2024.

Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dengan tema “Mewujudkan Perdamaian Dunia” di Hotel Peninsula Jakarta. Acara yang dihadiri oleh anggota PPWI dari seluruh Indonesia, perwakilan Puspen TNI (Mayjen Hariyanto), Bakamla, dan tamu undangan internasional ini membahas peran krusial pers dalam menjaga perdamaian di era digital yang penuh tantangan.

Peran Pers dalam Perdamaian:

Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S Pd.M Sc.Ma menekankan bahwa pers memiliki tanggung jawab besar dalam membangun narasi

positif dan menjembatani perbedaan. Melalui Rakornas ini, mereka merumuskan strategi bersama untuk meningkatkan kualitas jurnalisme dan memperkuat peran pers dalam membangun perdamaian dunia.

Dukungan Penuh PT. Mugi Jaya Wasa:

Capt.H.M.Anton Hermawan Eka Putra S.E.,M.M.,CHRA.,C.Med, Direktur PT. Mugi Jaya Wasa, hadir sebagai tamu undangan dan memberikan dukungan penuh terhadap Rakornas PPWI. Ia menegaskan komitmen perusahaan untuk mendukung kemajuan jurnalisme di era digital. "PT. Mugi Jaya Wasa yakin bahwa pers memiliki kekuatan besar untuk membangun masyarakat yang lebih baik," ujar Anton.

Komitmen Konkrit PT. Mugi Jaya Wasa:

Sebagai bentuk dukungan nyata, PT. Mugi Jaya Wasa berencana untuk:

- Meningkatkan literasi media melalui program edukasi.
- Memberikan akses informasi dan pelatihan bagi jurnalis muda.
- Memperkuat kemitraan dengan PPWI dalam program sosial.
- Menjalani kerjasama dengan maskapai penerbangan untuk memberikan kemudahan bagi anggota PPWI dengan harga tiket murah saat menuju Jakarta.

Isu Strategis yang Dibahas:

Rakornas PPWI membahas isu strategis terkait peran pers di era digital:

- Mendorong Jurnalisme yang Berkualitas.
- Membangun Kemitraan Global.
- Mendorong Literasi Media

Harapan dan Tujuan:

Rakornas ini diharapkan menghasilkan rekomendasi dan langkah konkret untuk meningkatkan peran pers dalam membangun perdamaian dunia dan membangun Indonesia yang lebih baik. [RED]

---oOo---



BREAKING NEWS: Atas Perintah Raja Maroko, Putra Mahkota Moulay El Hassan Sambut Presiden Tiongkok di Casablanca

Exclusive News-Casablanca

Raja Maroko, Yang Mulia King Mohammed VI, memerintahkan putranya, Yang Mulia Putra Mahkota Moulay El Hassan menyambut dan menerima Presiden Republik Rakyat Tiongkok, Yang Mulia Xi Jinping, yang sedang dalam kunjungan singkat ke Kerajaan Maroko, Kamis malam, 21 November 2024, di Casablanca. Setelah turun dari pesawat di Bandara Internasional Mohammed V di Casablanca, Kepala Negara Tiongkok itu terlihat disambut oleh Moulay El Hassan.

Selanjutnya, YM Xi Jinping disambut oleh Kepala Pemerintahan, Aziz Akhannouch, sebelum meninjau satu detasemen Pengawal

Kerajaan yang memberikan penghormatan kepada tamu negara tersebut.

Bersama Putra Mahkota Kerajaan Maroko, Presiden Tiongkok Xi Jinping kemudian disambut oleh Wali Wilayah Casablanca-Settat, Gubernur Provinsi Casablanca, Mohamed Mhidia, Ketua Dewan Regional Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz, Gubernur Provinsi Nouaceur, Jalal Benhayoun, Ketua Dewan Regional Nouaceur, Mohammed Salmani, dan Wali Kotamadya Nouaceur, Abdelaziz Radi.

Selain itu, Putra Mahkota Maroko Moulay El Hassan dan tamu kehormatannya Xi Jinping juga disambut oleh Li Changlin, Duta Besar Tiongkok untuk Maroko, Zhou Zhicheng, Menteri Penasihat di Kedutaan Besar Tiongkok, Xia Kelin, Atase Militer di Kedutaan Besar Tiongkok, dan Zheng Wei, dan Penasihat Ekonomi dan Komersial di Kedutaan Besar Tiongkok.

Di pintu masuk ruang tunggu VVIP bandara, Kepala Negara Tiongkok, yang didampingi oleh beberapa delegasi, antara lain anggota Komite Tetap Biro Politik dan Direktur Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok (PKT), Cai Qi; anggota Biro Politik Komite Sentral PKT dan Direktur Kantor Komisi Pusat Urusan Luar Negeri, Wang Yi; dan Wakil Menteri Luar Negeri, Hua Chunying, diundang ke upacara adat persembahan susu dan kurma.

Setelah istirahat sejenak di ruang tunggu VVIP, dilakukan prosesi resmi menuju kediaman atau tempat menginap Presiden Tiongkok itu di Casablanca yang merupakan ibu kota ekonomi Kerajaan Maroko.

Kunjungan ini mencerminkan ikatan persahabatan, kerja sama, dan solidaritas yang kuat antara masyarakat Maroko dan Tiongkok. Hal itu dapat terbangun berkat komitmen bersama Raja Maroko, King Mohammed VI, dan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, untuk memajukan kemitraan strategis Tiongkok-Maroko, yang diresmikan selama kunjungan bersejarah Raja Maroko ke Beijing pada Mei 2016.

Sementara itu, Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (PERSISMA), Wilson Lalengke menyambut gembira atas perkembangan hubungan Kerajaan Maroko dengan berbagai negara yang terjalin beberapa waktu ini.

“Saya sangat mendukung dan menyambut baik atas hasil yang dicapai oleh Raja Maroko, King Mohammed VI, dalam membangun hubungan kerja sama yang baik dan kuat dengan negara-negara di semua belahan dunia. Dalam tahun 2024 ini saja, tidak kurang dari 20-an MoU kerja sama, baik bilateral maupun multilateral yang ditandatangani oleh Pemerintah Kerajaan Maroko dengan pemerintahan negara sahabat,” ungkap pria yang berkesempatan mengunjungi Maroko tahun 2015 lalu untuk melihat dari dekat pelaksanaan program pembangunan di wilayah Sahara Maroko. *(PERSISMA/Red)*

---oOo---



Exclusive News -Indragiri Hilir

Kasus yang melibatkan Kepala SMPN 1 Tembilahan Hulu, Saruji, S.Ag, M.Pd.I, terus menjadi pembicaraan masyarakat Inhil setelah dinyatakan bersalah oleh Tim Saber Pungli. Pasalnya, hingga saat ini belum ada tindakan apapun dari Pj. Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Erisman Yahya. Pernyataan Erisman yang mengarahkan persoalan ini ke Dinas Pendidikan memicu pertanyaan tentang perannya sebagai pemimpin daerah.

Dalam pesan WhatsApp-nya ketika merespon pertanyaan wartawan tentang kasus Saruji, Erisman Yahya menyampaikan bahwa pihaknya telah memberikan himbauan untuk tidak melakukan pungli di sekolah saat apel bersama di halaman Kantor Bupati yang dihadiri kepala sekolah, guru dan wali murid. Meski telah memberikan

himbauan, masyarakat menginginkan kepastian sanksi tegas terhadap Saruji, sesuai rekomendasi dari Tim Saber Pungli.

“Kami membutuhkan kepastian, bukan sekadar himbuan. Apa fungsi Pj. Bupati jika tidak mengambil langkah konkret terhadap rekomendasi yang sudah jelas dan pasti?” tanya Bendahara DPC PPWI Inhil, Idham Rizal, Selasa, 19 November 2024.

Sementara itu, masyarakat menilai bahwa kasus ini menjadi ujian bagi Erisman Yahya dalam menunjukkan komitmen pemberantasan korupsi dan tata kelola pemerintahan yang bersih di Inhil. Publik mendesak agar Pj. Bupati segera mengambil langkah nyata dengan menjatuhkan sanksi sesuai rekomendasi Tim Saber Pungli demi menjaga kepercayaan masyarakat.

“Jika tidak ada tindakan tegas, ini hanya akan memperburuk citra pemerintah daerah dan menciptakan preseden buruk bagi penegakan hukum,” tambah Idham Rizal.

Mencuatnya kasus ini menunjukkan pentingnya transparansi, akuntabilitas dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan pemerintahan, terutama menyangkut pendidikan, yang menjadi pilar pembangunan bangsa. Rakyat menunggu langkah tegas Pj. Bupati untuk menunjukkan bahwa integritas tidak hanya menjadi slogan, tetapi tindakan nyata.

Kabid SMP pada Dinas Pendidikan Indragiri Hilir di Tembilahan, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, tidak memberikan tanggapan sampai berita ini diterbitkan. Walaupun Team Satgas Saber Pungli Kabupaten Inhil telah menerbitkan dan mengirimkan rekomendasi Kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan sanksi kepada Saruji selaku Plt. Kepala SMPN 01 Tembilahan Hulu sejak 11 Oktober 2024 lalu, namun hingga kini kasusnya terkesan dipeti-es-kan.

Menilik hal itu, sejumlah pihak menilai bahwa sangat mungkin oknum Dinas Pendidikan Inhil ikut makan uang pungli bersama Saruji dan komplotannya. Anggapan seperti ini muncul akibat dari enggannya Kadis Pendidikan memproses dedengkot pungli dunia pendidikan Inhil itu. “Sebaiknya Kadis Pendidikan Inhil juga segera diberhentikan dan diusut keterlibatannya dalam kasus tersebut,” cetus Ketua Umum

PPWI, Wilson Lalengke, yang sejak awal mengawal kasus tersebut, Selasa, 19 November 2024.

Beberapa pihak, tambah tokoh pers nasional ini, juga perlu diselidiki oleh aparat hukum terkait keterlibatan mereka dalam pusaran pungutan liar Saruji. “Termasuk delapan organisasi pers yang jadi backing Saruji. Sangat mungkin mereka juga ikut cawe-cawe melancarkan aksi korupsi si Plt. Kepsek ini, baik dalam bentuk pungutan liar modus jualan pakaian seragam sekolah maupun dugaan penggelapan dana BOS dan dana bantuan lainnya yang dikucurkan ke sekolah yang dipimpin Saruji,” tegas Wilson Lalengke seraya menyebutkan kedelapan organisasi pers yang dinilainya sebagai pelacur jurnalisisme, yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Wartawan Online (IWO), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi (PJID), dan Forum Komunikasi Wartawan Inhil (FKWI).

Selain itu, wartawan yang sangat anti korupsi ini juga mendesak aparat penegak hukum untuk memanggil Kadis Kominfo Indragiri Hilir, Trio Beni, yang diduga kuat bersekongkol dengan para mafia pungli Saruji di Tembilahan dalam mengkriminalisasi Ketua DPC PPWI Inhil, Rosmely, beberapa waktu lalu. Oknum pejabat Kominfo ini diduga kuat telah menggarong uang rakyat melalui pola KKN dengan kedelapan organisasi pers yang dipelihara oleh Trio Beni.

“Untuk diketahui, Rosmely melayangkan surat permohonan ke Kominfo Inhil untuk mendapatkan data dan informasi publik terkait kerja sama media dan publikasi. Bahkan sudah dua kali dikirimkan surat permohonannya, namun si Trio Benin itu bandel tidak memenuhi permintaan informasi publik yang dimintakan tersebut. Oleh karena itu, saya menduga kuat dia terlibat langsung dalam mengkriminalisasi Rosmely. Jika Inhil ingin maju dan lebih baik, orang seperti Trio Beni itu harus diberhentikan segera, karena jika tidak, habis uang negara digarongnya sendiri untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya saja,” sebut Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu mengakhiri pernyataannya. *(TIM/Red)*

Pj. Bupati Inhil Copot Jabatan Kepala SMPN 1 Tembilahan Hulu

Exclusive News-Indragiri Hilir

Penjabat (Pj) Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H. Erisman Yahya, memberikan sanksi tegas kepada Kepala Sekolah SMPN 1 Tembilahan Hulu setelah dinyatakan bersalah oleh Tim Saber Pungli Kabupaten Inhil. Sanksi yang dijatuhkan meliputi pencopotan jabatan dan penundaan kenaikan pangkat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Inhil, Eko Heri Purwanto, SH., MH., dijelaskan bahwa PNS berinisial SJ, yang menjabat sebagai Kepala Sekolah berdasarkan SK Bupati Inhil Nomor Kpts. 691/XI/HK-2024 tanggal 19 November 2024, telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun. Selain itu, SJ juga dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Sekolah.

“Keputusan ini diambil berdasarkan ketentuan yang berlaku, melalui proses pertimbangan yang melibatkan OPD terkait. Setiap pelanggaran yang terbukti akan ditindak sesuai aturan,” ujar Eko mewakili Pj. Bupati Inhil, pada Selasa 19 November 2024.

Langkah ini diharapkan menjadi peringatan bagi seluruh aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir agar senantiasa menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

Peristiwa naas yang dialami rekan guru Saruji ini menjadi pelajaran bagi semua pegawai pemerintah di negeri ini agar bekerjalah dengan baik dan menghindarkan diri dari perilaku yang merugikan masyarakat. (*)

---oOo---



Kepemimpinan Pj Bupati Erisman Yahya Dianggap Amburadul, Ketua Umum DPN PPWI Dampingi DPC PPWI Inhil Surati Mendagri

Exclusive News-INHIL Tembilahan.

Masa pemerintahan Pj. Bupati Indragiri Hilir, Erisman Yahya, semakin mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat dan awak media. Meskipun memiliki latar belakang sebagai mantan wartawan senior, kepemimpinan Erisman Yahya dinilai tidak mampu mengatasi berbagai persoalan yang kini melanda Kabupaten Indragiri Hilir. Salah satu yang mencuat adalah dugaan ketidakberesan

dalam pengelolaan pemerintahan, termasuk isu-isu di sektor pendidikan, informasi publik, hingga ketidakjelasan pelantikan pejabat tinggi daerah seperti Sekretaris Daerah (Sekda) Definitif. Kamis, 21/11/2024.

Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilson Lalengke, yang hadir mendampingi Ketua DPC PPWI Indragiri Hilir, Rosmely, untuk bertemu dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi yang berkembang di Inhil. Mereka mendesak agar pemerintah pusat turun tangan untuk menilai dan memperbaiki kinerja pemerintahan yang dinilai amburadul di bawah kepemimpinan PJ Bupati Erisman Yahya.

Berdasarkan pengamatan berbagai pihak, kepemimpinan Erisman Yahya dinilai gagal dalam menangani berbagai isu yang krusial di Inhil. Salah satu masalah utama adalah ketidakjelasan dan ketidakompakan di kalangan wartawan di Inhil, yang semakin memperburuk citra pemerintahan daerah. Menurut beberapa sumber, terdapat kecenderungan saling menghujat dan provokasi antara sesama wartawan yang justru mengarah pada tindakan-tindakan destruktif, termasuk upaya memprovokasi pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan kriminal.

Lebih parah lagi, ada dugaan keterlibatan PJ Bupati Erisman Yahya dalam mendukung kebijakan yang tidak transparan terkait dengan kerjasama media dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Indragiri Hilir. DPC PPWI Inhil, yang dipimpin oleh Rosmely, mengungkapkan bahwa mereka kesulitan mendapatkan informasi terkait kerjasama media yang diinisiasi oleh Diskominfo, yang memunculkan kecurigaan adanya upaya penutupan informasi publik yang seharusnya menjadi hak masyarakat dan di duga ada korupsi besar besaran di Dinas tersebut yang di duga banyak nya titipan pokir pikir dewan melalui dinas Kominfo.

Selain masalah di sektor media, sektor pendidikan di Kabupaten Inhil juga tak lepas dari sorotan. Ketua PPWI Inhil, Rosmely, mengungkapkan bahwa terdapat indikasi kuat terkait praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah di berbagai

sekolah di Inhil. Ironisnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Inhil diduga tutup mata terhadap kasus-kasus pungli ini, yang semakin merugikan masyarakat dan dunia pendidikan.

Mely menyebutkan bahwa bukan tidak mungkin, Dinas Pendidikan justru menjadi pelaku utama dalam praktik-praktik pungli yang merugikan pihak-pihak terkait. Bapak Erisman harusnya tindak tegas juga Kadisdik bukan hanya kepek nya yang di beri sanksi.

“Situasi ini sangat memprihatinkan. Kami meminta pemerintah daerah, khususnya PJ Bupati Erisman Yahya, untuk segera mengambil tindakan tegas. Sebagai mantan wartawan senior, seharusnya beliau memahami betul prinsip keterbukaan informasi dan mengedepankan transparansi dalam pemerintahan, serta sebagai pemimpin daerah Inhil saat ini segera mengambil sikap yang sangat bijak dalam mengatasi suratu persoalan, berikan juga sanjsi untuk Kadisdik tersebut, mengapa mereka lalai dalam mengawasi sekolah yang ada di di Inhil.,” ujar Mely

Wilson Lalengke mendesak agar pemerintah pusat mengevaluasi kepemimpinan PJ Bupati Erisman Yahya yang dinilai tidak profesional dalam menjalankan roda pemerintahan.

Wilson Lalengke menegaskan bahwa PPWI siap memberikan dukungan penuh terhadap upaya penegakan hukum dan keterbukaan informasi di Kabupaten Indragiri Hilir.

“Sebagai organisasi yang peduli terhadap dunia media dan transparansi, PPWI tidak akan tinggal diam melihat adanya ketidakberesan yang merugikan masyarakat. Kami akan terus mengawal dan mendampingi perjuangan ini”, tutup pak Wilson. *(Tim/Red)*

---oOo---



PPWI Inhil Menyoroti Sikap Kadisdik dan Pemkab Inhil Terkait Dugaan Pungli di Sekolah

Exclusive News-Inhil, 22 November 2024

Tim DPC Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) memberikan tanggapan atas bantahan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil terkait dugaan “tutup mata” Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) terhadap isu pungutan liar (pungli) di sekolah. Pernyataan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Kadis Kominfops), Trio Beni, menjadi sorotan utama tim PPWI.

Ketua PPWI Inhil, Mely, mempertanyakan alasan Kadisdik tidak memberikan tanggapan langsung terkait isu di bidangnya. “Kalau urusan Kominfo, wajar Trio Beni yang berbicara, karena itu tugasnya.

Tapi ini masalah Dinas Pendidikan, kenapa Kadisdik diam dan justru diwakili oleh Kadis lain? Apa sebenarnya fungsi Kadisdik di Inhil ini, dan siapa sebenarnya trio benih ini mengapa harus semua dia yang angkat bicara?" tegas Mely.

PPWI Inhil juga mengkritisi surat edaran yang disebut-sebut telah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Inhil. Hingga laporan PPWI kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ditayangkan, tim PPWI mengaku tidak menerima informasi terkait surat tersebut. Selain itu, saat konfirmasi ke Kabid SMP, pihak terkait justru tidak merespons dan bahkan memblokir nomor kontak salah satu pengurus PPWI.

Yang lebih membingungkan, menurut Mely, surat edaran baru diterima oleh PPWI pada sore hari setelah laporan kepada Kemendagri disampaikan. Namun, tanggal pada surat tersebut jauh mundur dari waktu penerimaan. "Kalau memang surat edaran itu sudah ada, kenapa tidak diberikan sejak awal atau dipublikasikan agar masyarakat tahu isinya? Apa yang sebenarnya direncanakan hingga surat ini terkesan dirahasiakan?" ungkap Mely dengan nada kecewa.

Bukan hanya itu, saat di konfirmasi ke PJ bupati bpk Erisman Yahya sendiri mengatakan sangat disayangkan mengapa satu pun media tidak ada mempublikasikan tegurannya bahkan media pemda pun tidak ada memberitakan adanya teguran tersebut, Ini menjadi pertanyaan besar, apakah ada upaya untuk menutup-nutupi persoalan ini.

PPWI Inhil Menuntut Transparansi.

Melalui berita ini, PPWI Inhil meminta Pemkab Inhil, khususnya Dinas Pendidikan, untuk bersikap transparan dan profesional dalam menangani isu-isu publik. PPWI juga mendesak agar surat edaran yang diterbitkan segera dipublikasikan secara luas agar masyarakat mengetahui langkah apa yang diambil untuk menangani kasus pungli di sekolah.

"Ini masalah kepercayaan publik. Jika instansi terkait terus bersikap tertutup, wajar jika muncul kecurigaan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan, dan jangan bisa hanya menyalahkan

wartawan dan menilai wartawan tidak profesional dalam membuat berita” tutup Mely.

“Para pejabat itu mencoba mengelabui publik dengan rangkaian kebohongan, tapi kedodoran. Malahan sebaliknya, lebih transparan terlihat kebungulan para pejabat Inhil itu, dari mulai Pj. Bupati, Dinas Kominfo si Trio Beninya, hingga Kadis Pendidikan, dan seterusnya. Pemerintahan yang dikelola dengan kebohongan hanya akan melahirkan birokrasi yang buruk dan amburadul, dan akhirnya berujung pada pelayanan publik yang mengecewakan rakyat.

Transaparansi itu semestinya dimulai dari dinas yang mengurus komunikasi dan informasi. “Lah, Kadis Kominfo Inhil, Trio Beni, saja sangat tertutup, tidak bersedia memberikan informasi soal data media-media yang bekerja sama dengan dinas tersebut dalam pengelolaa informasi yang menggunakan uang rakyat. Bagaimana mungkin kita bisa mengharapkan transparansi pemerintahan dari para pejabat otak bungul semacam itu? Capek deh!” sindir Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, dari Jakarta menyikapi problematika pemerintahan di Inhil yang dinilainya sangat bobrok tersebut.

---oOo---

Terkait Dugaan Pungli di Sekolah, PPWI Inhil Soroti Sikap Kadisdik dan Pemkab Inhil yang Memble

Exclusive News-Inhil

Tim DPC Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) memberikan tanggapan atas bantahan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil terkait dugaan “tutup mata” Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) terhadap isu pungutan liar (pungli) di sekolah-sekolah. Pernyataan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Kadis Kominfops), Trio Beni, menjadi sorotan utama tim PPWI.

Ketua PPWI Inhil, Mely, mempertanyakan alasan Kadisdik tidak memberikan tanggapan langsung terkait isu di bidangnya. “Kalau urusan Kominfo, wajar Trio Beni yang berbicara karena itu tugasnya. Tapi ini masalah pendidikan, kenapa Kadisdik diam dan justru diwakili oleh Kadis lain? Apa sebenarnya fungsi Kadisdik di Inhil ini, dan siapa sebenarnya Trio Beni ini mengapa harus semudah itu dia yang angkat bicara?” ketus Mely dengan nada tanya.

PPWI Inhil juga mengkritisi surat edaran yang disebut-sebut telah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Inhil. Hingga laporan PPWI kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ditayangkan, tim PPWI mengaku tidak menerima informasi terkait surat tersebut. Selain itu, saat konfirmasi ke Kabid SMP, pihak terkait justru tidak merespons dan bahkan memblokir nomor kontak pengurus PPWI.

Yang lebih membingungkan, menurut Mely, surat edaran Kadisdik yang berisi larangan pungli di sekolah-sekolah baru diterima oleh PPWI pada sore hari setelah Pj Bupati Inhil, Erisman Yahya, dilaporkan ke Kemendagri. Namun, tanggal surat edaran tersebut dibuat mundur sebulan dari waktu penerimaan. “Kalau memang surat edaran itu sudah ada, kenapa tidak diberikan sejak awal atau dipublikasikan agar masyarakat tahu isinya? Apa yang sebenarnya direncanakan hingga surat ini terkesan dirahasiakan?” ungkap Mely dengan nada kecewa.

Bukan hanya itu, saat di konfirmasi ke Pj Bupati, Erisman Yahya sendiri mengatakan sangat disayangkan, mengapa tidak satu pun

media yang mempublikasikan tegurannya ke bawahannya itu. Bahkan media yang dikelola pemda pun tidak memberitakan adanya teguran tersebut. Ini menjadi pertanyaan besar, apakah ada upaya untuk menutup-nutupi persoalan ini.

PPWI Inhil Menuntut Transparansi

Melalui berita ini, PPWI Inhil meminta Pemkab Inhil, khususnya Dinas Pendidikan, untuk bersikap transparan dan profesional dalam menangani isu-isu publik. PPWI juga mendesak agar surat edaran yang diterbitkan segera dipublikasikan secara luas agar masyarakat mengetahui langkah apa yang diambil untuk menangani kasus pungli di sekolah.

“Ini masalah kepercayaan publik. Jika instansi terkait terus bersikap tertutup, wajar jika muncul kecurigaan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan, dan jangan bisanya hanya menyalahkan wartawan dan menilai wartawan tidak profesional dalam membuat berita,” tutup Mely.

Sementara itu, Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, yang dimintai pendapatnya tentang ‘kekacauan birokrasi’ setelah Pj. Bupati Erisman Yahya dilaporkan ke Menteri Dalam Negeri, mengatakan bahwa salah satu kebiasaan buruk pejabat adalah membohongi publik. “Para pejabat di Indragiri Hilir itu mencoba mengelabui publik dengan rangkaian kebohongan, tapi kedodoran. Malahan sebaliknya, lebih transparan terlihat kebungulan alias kedunguan para pejabat itu, mulai dari level Pj. Bupati, Dinas Kominfo, si Trio Beninya, hingga Kadis Pendidikan, dan seterusnya,” sebut alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini sambil menambahkan bahwa pemerintahan yang dikelola dengan kebohongan hanya akan melahirkan birokrasi yang buruk dan amburadul, yang akhirnya berujung pada pelayanan publik yang mengecewakan rakyat.

Transparansi itu, tambah pria yang pernah bertugas sebagai guru PPKN di SMP Negeri Sapat, Inhil, periode 1990-1993 ini, semestinya dimulai dari dinas yang mengurus komunikasi dan informasi. Dinas ini yang terkait langsung dengan UU Keterbukaan Informasi Publik dan

bertugas untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah tersebut.

“Lah, Kadis Kominfo Inhil, Trio Beni, saja sangat tertutup, tidak bersedia memberikan informasi soal data media-media yang bekerja sama dengan dinas tersebut dalam pengelolaan informasi yang menggunakan uang rakyat. Bagaimana mungkin kita bisa mengharapkan transparansi pemerintahan dari para pejabat otak bungul semacam itu? Capek deh!” sindir Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, menyikapi problematika pemerintahan di Inhil yang dinilainya memble dan bobrok tersebut. *(TIM/Red)*

---oOo---



**187 Perwira Lulus Dikreg Sesko TNI Ke-52
Siap Hadapi Tantangan Global dan Nasional**

<https://exclusivenews.tomsbook.co.id>

Exclusive News-(Puspen TNI).

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin Upacara Penutupan Pendidikan Reguler (Dikreg) Ke-52 Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Sesko TNI) TA 2024, bertempat di Markas Komando Sesko TNI, Jl. R.A.A. Martanegara No.11, Bandung, Jawa Barat, Selasa (26/11/2024).

Sebanyak 187 Perwira, yang terdiri dari Perwira Menengah (Pamen) TNI-Polri dan Angkatan Bersenjata negara sahabat, telah berhasil menyelesaikan program pendidikan ini. Para lulusan Dikreg Sesko TNI ini diharapkan mampu mendukung pengembangan karir, memperkuat diplomasi militer dan memajukan kerjasama antar negara serta menjadi pemimpin strategis yang adaptif, profesional, dan berwawasan global dalam menghadapi tantangan keamanan Nasional maupun Internasional.

Dalam amanatnya, Panglima TNI menyampaikan bahwa Pendidikan yang telah diselesaikan adalah bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari pengabdian yang lebih besar. “Dalam tugas ke depan, para Perwira akan menghadapi tantangan berupa konflik terbuka, perang asimetris, ketegangan perbatasan hingga perebutan sumber daya alam, serta permasalahan sosial lainnya,” ungkapnya.

Mengakhiri amanatnya, Panglima TNI menyampaikan beberapa pesan kepada para Perwira Lulusan Dikreg Sesko TNI tersebut. “Tetap meningkatkan keimanan, mengembangkan SDM TNI/Polri yang profesional dan berjiwa kebangsaan, menjadi teladan di lingkungan kerja dan masyarakat, serta terus mengasah kemampuan intelektual, emosional, dan kepemimpinan serta menjaga nama baik alumni Sesko TNI dengan berkontribusi melalui pemikiran strategis dalam Operasi Gabungan TNI, baik di tingkat Nasional maupun Internasional, demi mewujudkan TNI yang PRIMA,” pesan Panglima TNI.

Di tempat yang sama, saat menjawab pertanyaan dari sejumlah media terkait peran TNI pada Pilkada 2024 Panglima TNI menyampaikan bahwa TNI telah menyiapkan Personel dan Alutsista untuk mengamankan Pilkada serentak 2024. “TNI menyiapkan 169.369

Personel serta Alutsista baik itu Herkules, Helly, Truk pengangkut serta KRI,” ujarnya.

Panglima TNI juga berpesan kepada seluruh masyarakat, “Masyarakat jangan mudah terprovokasi dan sama-sama mari kita ciptakan suasana yang aman dan damai pada Pilkada serentak 2024,” pungkas Panglima TNI.

Turut hadir pada acara tersebut diantaranya Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, Koorsahli Kasad Letjen TNI Sonny Aprianto, Dansesko TNI Marsdya TNI Arif Widiyanto, para Asisten Panglima TNI, Kapuspen TNI, para pejabat utama Mabes TNI, Mabes Polri, Mabesad, Mabasal, dan Mabasau serta para tamu undangan lainnya.

#tniprima

#tnipatriotnkri

#nkrihargamati

#tnikuatrakyatbermartabat

Autentikasi : Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi

---oOo---



Wakapuspen TNI Buka Rakor PPID Mabes TNI TA 2024

<https://exclusivenews.tomsbook.co.id>

Exclusive News-(Puspen TNI).

Wakil Kepala Pusat Penerangan (Wakapuspen) TNI Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah mewakili Kapuspen TNI membuka Rapat Koordinasi (Rakor) PPID (Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi) Mabes TNI TA. 2024 dengan mengangkat tema "Penguatan PPID Mabes TNI Dalam Implementasi UU RI No. 14 Tahun 2008," bertempat di Aula Balai Wartawan Puspen TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (26/11/2024).

Kapuspen TNI Mayjen TNI Hariyanto dalam sambutannya yang dibacakan Wakapuspen TNI menyampaikan bahwa Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara dan/atau Badan Publik lainnya.

“Guna menjamin terlaksananya prosedur keterbukaan informasi publik dengan baik, berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor: 611/VII/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pengangkatan Kepala Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan TNI, maka ditunjuklah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di masing-masing institusi sampai dengan pelaksana di Satuan Kerja,” ungkap Kapuspen TNI.

Diakhir sambutannya, Kapuspen TNI mengatakan bahwasannya saat ini TNI sedang terus berusaha meningkatkan kinerjanya di seluruh bagian melalui indikator pelaksanaan pembangunan zona integritas yang merupakan akselerasi percepatan dan miniatur dari program reformasi birokrasi di jajaran TNI. “Keberadaan PPID memiliki peran yang sangat penting dan utama karena terkait dengan pelayanan publik yang harus Prima,” pungkasnya.

Rakor PPID ini dihadiri oleh seluruh pejabat PPID jajaran Mabes TNI. Pada Rakor tersebut juga menghadirkan narasumber dari Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat RI Annie Londa, S.H., M.H., dengan materi “Era Keterbukaan Informasi Apakah Semua harus dibuka??? Awareness Implementasi UU KIP.”

#tniprima

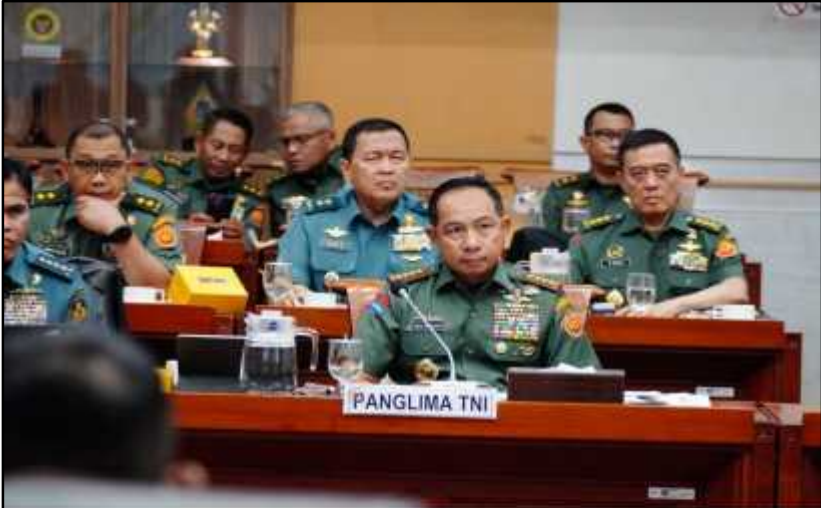
#tnipatriotnkri

#nkrihargamati

#tnikuatrakyatbermartabat

Autentikasi : Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi

---oOo---



Panglima TNI: TNI Kerahkan 169 Ribu Personel dan Alutsista, Amankan Pilkada Serentak 2024

<https://exclusivenews.tomsbook.co.id>

Exclusive News-(Puspem TNI).

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pertahanan Republik Indonesia Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR RI dengan pembahasan kesiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 dan Penyampaian Program 100 hari kerja Menteri Pertahanan RI yang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, bertempat di Ruang Rapat Komisi I DPR RI Gedung Nusantara II Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

Dalam paparannya, Panglima TNI menjelaskan bahwa TNI akan membantu pemerintah dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 dan membantu Polri dalam pengamanan setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 agar berjalan dengan aman, tertib dan lancar. “Untuk mengamankan Pilkada Serentak TNI

mengerahkan personel sebanyak 169.369 orang yang terdiri dari TNI Angkatan Darat 139.339 orang, TNI AL 19.793 orang dan TNI AU 10.237 orang, selain itu Alutsista TNI dipersiapkan dan disediakan dalam rangka pengamanan serta distribusi logistik,” ungkapnya.

Selanjutnya, Panglima TNI memaparkan langkah-langkah mitigasi konflik yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengurangi potensi konflik yang muncul selama proses Pilkada, yakni penguatan penegakan hukum, program edukasi politik secara masif, monitoring dan pengawasan yang ketat dengan pelibatan pihak-pihak independen serta unsur-unsur terkait hingga dialog dan mediasi deskripsi melalui langkah proaktif, melalui dialog dan mediasi yang melibatkan tokoh masyarakat, partai politik, dan pihak yang berwenang.

“Pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa TNI siap memberikan dukungan penuh kepada Lembaga Penyelenggara Pilkada dalam hal ini KPU untuk menjamin suksesnya pelaksanaan Pilkada Serentak melalui kesiapan TNI dalam menjaga stabilitas keamanan, mendukung distribusi logistik dan menjaga serta menjunjung tinggi netralitas TNI. Upaya-upaya tersebut merupakan wujud komitmen TNI agar Pilkada Serentak tahun 2024 dapat terlaksana dengan aman dan lancar,” pungkas Panglima TNI.

Turut hadir dalam rapat tersebut diantaranya Kasal, Kasau, Wamenhan RI, Wakasad, Kabais TNI, para Asisten Panglima TNI, Danpuspom TNI, Kababinkum TNI, Kapuspen TNI, Anggota Komisi I DPR RI, para Pejabat Utama Kemhan serta para Pejabat Utama TNI lainnya.

#tniprima

#tnipatriotnkri

#nkrihargamati

#tnikuatrakyatbermartabat

Autentikasi : Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi

---oOo---



Panglima TNI Dampingi Menkopolkam Monitoring Pilkada Serentak Tahun 2024

<https://exclusivenews.tomsbook.co.id>

Exclusive News, (Puspem TNI).

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Menkopolkam RI) Budi Gunawan melaksanakan Siaga Monitoring Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024, bertempat di Subden Mabes TNI, Jl. Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2024).

Dalam kegiatan tersebut, perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Badan Intelijen Negara, TNI, dan Polri memaparkan perkembangan terkini terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di seluruh wilayah Indonesia.

Siaga Monitoring ini menjadi langkah penting dalam memantau secara langsung situasi di lapangan dan memastikan Pilkada Serentak tahun 2024 yang diselenggarakan di 37 Provinsi, 415 Kabupaten dan 93 Kota dapat berjalan aman, lancar, dan demokratis.

Hadir pada acara tersebut Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Perhubungan RI, Menteri Komunikasi dan Digital RI, Kapolri, Kasad, Kasal, Kasau, Irjen TNI, Kabais TNI, Kepala BNPT, Kepala BNPB, Asrenum Panglima TNI, Asintel Panglima TNI, Asops Panglima TNI, Aslog Panglima TNI, Aster Panglima TNI, Danpuspom TNI, Kapuspen TNI dan para Pejabat Tinggi TNI-Polri serta para Pejabat Tinggi Kementerian dan Lembaga terkait lainnya.

#tniprima

#tnipatriotnkri

#nkrihargamati

#tnikuatrakyatbermartabat

Autentikasi : Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi

---oOo---



Kasatreskrim Polres Solok Selatan Tewas Ditembak Rekan Sesama Polisi

Exclusive News-SOLOK SELATAN

Kasatreskrim Polres Solok Selatan, AKP Ryanto Ulil Anshar, tewas ditembak oleh rekannya, Kabag Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar, di area parkir Polres Solok Selatan, Sumatra Barat, pada Jumat, 22 November 2024.

Peristiwa tragis ini diduga dipicu oleh ketidaksenangan pelaku terhadap tindakan korban yang menangkap pelaku tambang ilegal. AKP Ryanto mengalami dua luka tembak di bagian kepala, yang mengakibatkan dirinya meninggal dunia di lokasi kejadian. Jenazah korban telah dipulangkan ke kampung halamannya di Makassar, Sulawesi Selatan, untuk dimakamkan. Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Dwi Sulistyawan, menyatakan bahwa kasus ini sedang dalam penyelidikan mendalam oleh pihak kepolisian.

“Kami memastikan semua langkah dilakukan sesuai prosedur untuk mengungkap fakta-fakta dalam insiden ini,” ujar Kombes Dwi.

Polda Sumatera Barat juga menegaskan komitmen untuk menangani kasus ini secara transparan dan profesional demi memberikan kejelasan kepada publik. Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) telah dilakukan, dan sejumlah saksi sedang diperiksa guna memperkuat proses penyelidikan. Hingga kini, pihak berwenang terus berupaya mencari motif mendalam dari insiden ini serta memastikan keadilan ditegakkan dalam proses hukum.

---oOo---

Kronologis Awal Penembakan Oleh Kabagops Polres Solok Selatan Terhadap Kasat Reskrim Solok Selatan

Exclusive News

Kasat Reskrim, AKP Ulil Ryanto Anshari, S.I.K., M.H Nrp. 90080293, tewas ditembak rekannya sesama polisi yaitu AKP Dadang Iskandar, S.H. Nrp. 67050661, di Parkiran Polres Solok Selatan Jorong Bukit Malintang Barat Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, pada hari Jum'at, 22 November 2024, pukul 00.15 WIB. Motifnya, Kabagops Polres Solok Selatan sebagai pelaku penembakan diduga tidak senang dengan penangkapan yang dilakukan oleh Sat Reskrim Polres Solok Selatan terhadap pelaku galian C ilegal.

Kronologis kejadian berdasarkan saksi-saksi yaitu Aipda Tomi Yudha T, Aspolres Solok Selatan (Kanit Tipidter Sat Reskrim Polres Solok Selatan) dan Briptu Satryadi, Aspolres Solok Selatan (Banit Tipidter Sat Reskrim Polres Solok Selatan), berawal ketika Kasat Reskrim Polres Solok Selatan beserta anggota Sat Reskrim melakukan penangkapan terhadap pelaku tambang galian C. AKP Dadang Iskandar mendatangi Sat Reskrim dan menemui Kasat Reskrim di parkiran dekat ruang Identifikasi Sat Reskrim. AKP Dadang Iskandar langsung melakukan penembakan ke arah Kepala Kasat Reskrim yang saat itu hendak mengambil HP di dalam mobil Kasat Reskrim.

Akibat kejadian tersebut Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Ryanto, SIK langsung di bawa ke puskesmas Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan. Dari keterangan Dokter Puskesmas, AKP Ulil Ryanto, SIK mengalami luka tembak di bagian pelipis Kanan tembus ke belakang kepala yang mengakibatkan Korban Meninggal Dunia. Pelaku saat itu langsung dilakukan pengejaran oleh Unit Opsnal Polres Selatan.

Berikutnya telah diamankan Barang Bukti, yaitu :

- a. 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Rush berwarna Hitam dengan Nopol : B 1215 QH.

- b. Selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 2 (dua) butir yang berasal dari senjata Api Pendek Jenis Pistol HS dengan Nomor : 260139 (disebelah ruangan Identifikasi Sat Reskrim Polres Solok Selatan).
- c. Selongsong Peluru kaliber 9 mm sebanyak 7 (tujuh) butir yang berasal dari senjata Api Pendek Jenis Pistol HS dengan Nomor : 260139 (di sekitar rumah dinas Kapolres Solok Selatan).

Pada saat kejadian, telah dilakukan upaya membawa korban ke Puskesmas terdekat. Kemudian membawa korban ke Rumah Sakit Bhayangkara Kota Padang. Selain itu mengamankan TKP dan melakukan Identifikasi. Selanjutnya melakukan pencarian dan pengejaran terhadap Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar (Pelaku penembakan). *(TOMI)*

---oOo---

Oknum Kapolres Pringsewu, AKBP Yunus Saputra, dan bukti Pengaduan Propam (Insert: Wilson Lalengke)

Lecehkan Media Grassroot, Wilson Lalengke Laporkan Kapolres Pringsewu ke Divisi Propam Polri

Exclusive News-Jakarta

Kapolres Pringsewu, AKBP Yunus Saputra, kembali berulah. Setelah beberapa waktu lalu dia dikecam keras karena melarang kepala sekolah dan pejabat pemerintah lainnya di wilayah Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, untuk melayani media-media yang tidak terverifikasi dewan pers, kali ini dia menyebarkan pesan suara (voice note) yang berisi pelecehan media-media grassroot tersebut dan mengancam para pekerja media ini. Pesan suara yang diduga kuat

dibuat sendiri oleh sang Kapolres Pringsewu itu mulai viral hari ini, Senin, 18 November 2024.

Merespon hal tersebut, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, melayangkan Laporan Pengaduan Masyarakat ke Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Kepolisian Republik Indonesia. Lapdumas yang disampaikan melalui aplikasi Yanduan Divpropam telah diterima oleh petugas dengan bukti penerimaan laporan nomor: SPSP2/005556/XI/2024/BAGYANDUAN, tertanggal 18 November 2024.

Dalam laporannya, Wilson Lalengke menceritakan kronologi kejadian saat dirinya menerima kiriman voice note dari reran media di Lampung bernama Anwar. "Saya menerima kiriman voice note atau pesan suara (transkrip terlampir) berdurasi 1 menit 32 detik ke nomor WhatsApp saya (081371549165) dari rekan media di Lampung bernama Anwar dari BhahanaNusantaraNews.Com, pada hari ini Senin, 18 November 2024, sekira pukul 09.54 wib. Voice note tersebut diduga kuat berasal dari AKBP Yunus Saputra, Kapolres Pringsewu, yang berisi ancaman terhadap warga pekerja media, diskriminasi media, pelecehan media-media grassroot, dan penuh kata-kata yang tidak pada tempatnya untuk disampaikan oleh seorang polisi (pelindung, pelayan, pengayom, dan petugas rakyat) yang menjabat sebagai kapolres." Demikian tulisnya di halaman kronologi pelaporan dumas Propam Polri tersebut.

Selain dirinya, jelas Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu, sejumlah wartawan juga sangat dirugikan oleh pesan suara Kapolres Pringsewu yang dinilainya dungu ini. "Para wartawan Lampung yang juga turut dirugikan, antara lain adalah Anwar dari BhahanaNusantaraNews.Com, Teuku Azhari dari media VIPNews.Com, Shoehendra Gunawan dari BeritaNasionalTV.Com, dan Angga Rinaldo yang merupakan Biro Media BhahanaNusantaraNesw.Com," tulis Wilson Lalengke dalam laporannya.

Poin krusial yang dipersoalkan wartawan senior tersebut adalah pernyataan Yunus Saputra yang dinilainya sangat melecehkan dan memandang rendah keberadaan media-media grassroot yang tumbuh

berkembang di negara ini. Padahal, Kedutaan Besar Belanda di Jakarta beberapa waktu lalu justru memuji perkembangan dan eksistensi 40-ribuan media online yang menjadi cerminan perkembangan demokrasi di Indonesia.

“Sangat mengherankan, pemerintah asing justru menghargai keberadaan media-media grassroot yang terus berkembang pesat belakangan ini, tapi malah ada kapolres otak kosong mencela, melecehkan, dan menghina media-media kita. Si kapolres itu bahkan melecehkan Kementerian Hukum dan HAM yang menerbitkan legalitas terhadap media-media itu, dia justru menghamba kepada lembaga swasta bernama dewan pers pembina para wartawan bermental korup di PWI dan organisasi konstituen dewan pers lainnya. Itu super dungu namanya,” tegas Wilson Lalengke dengan nada jengkel.

Semua pihak harus tahu, tambahanya, bahwa ketentuan verifikasi media di dewan pers itu tidak memiliki dasar hukum, hanya akal-akalan lembaga partikelir itu sendiri. “Untuk diketahui dan dicamkan baik-baik bahwa ketentuan verifikasi media di dewan pers itu tidak ada dasar hukumnya alias illegal. Verifikasi media selama ini sesungguhnya telah dijadikan modus oleh dewan pers untuk memeras media-media di seluruh Indonesia. Silahkan lakukan pendaftaran dan verifikasi media ke dewan pers, Anda akan dimintai uang administrasi hingga puluhan juta rupiah. Bahkan laporan yang masuk ke Sekretariat PPWI Nasional, ada media yang sudah bayar Rp. 35 juta, namun belum diterbitkan sertifikat terverifikasi atas media tersebut. Apa ungkapan yang pas untuk lembaga tukang verifikasi media itu kalau bukan bangsat?” sebut Wilson Lalengke.

Sebagai pengetahuan bersama, berikut ini dituliskan transkrip pesan suara yang membuat para wartawan di Lampung dan se-Indonesia meradang. _Saya Kapolres Pringsewu, AKBP Yunnus Saputra. Himbuan ini untuk Anda yang bukan wartawan dan mengaku-ngaku sebagai wartawan. Jika Anda masih melakukan intimidasi terhadap kepala dinas, kepala pekon, kepala sekolah dan kepala puskesmas di wilayah saya dengan dalih Anda punya data penyalahgunaan anggaran untuk dipublikasikan pada media Anda yang tidak ada yang baca itu,

yang tidak terverifikasi di dewan pers itu, bahkan dengan ancaman akan melakukan audit segala yang bukan kewenangan Anda itu, Anda akan berhadapan dengan kami Polres Pringsewu. Presiden Prabowo hendak melindungi anggaran negara dari kebocoran, malah justru Anda yang memaksa membocori anggaran negara untuk perut Anda sendiri. Anggaran ini untuk membangun negara, untuk menyejahterakan masyarakat banyak, bukan untuk memperturutkan kekejian Anda. Ini adalah peringatan terakhir. Segera keluar dari wilayah saya. Jika tidak, kami akan tindak tegas. Dan bertobatlah, maka Tuhan akan mengampuni kalian. Uang itu tidak akan membuat kalian kaya. Justru karena buruknya akan menurun ke anak-anak cucu kalian. Selesai._

Menurut Wilson Lalengke, setidaknya terdapat tujuh frasa dan kalimat Yunus Saputra dalam pesan suara itu yang sangat tidak pantas diucapkan seorang kapolres, seorang petugas yang hidup dan celana dalamnya dibiayai dari uang rakyat. Pertama, dia mengatakan 'media Anda yang tidak ada yang baca itu'. Ini merupakan pelecehan media, pelecehan terhadap pemilik dan pengelolanya, serta pelecehan terhadap lembaga resmi negara yakni Kementerian Hukum HAM yang menerbitkan SK AHU untuk media-media-media yang dilecehkannya itu.

Kedua, Yunus Saputra mengatakan 'media Anda yang tidak terverifikasi di dewan pers itu'. "Lembaga-lembaga di negara ini, seperti ormas, LSM, organisasi pers, perusahaan, termasuk perusahaan pers, disahkan keberadaannya oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dasar hukum tentang keharusan verifikasi media di dewan pers tidak ada alias illegal. Pernyataan kapolres ini asbun dan terkesan dia tidak mengerti aturan hukum. Si Kapolres Pringsewu, AKBP Yunus Saputra ini buta hukum, tidak pantas jadi kapolres," kata Wilson Lalengke.

Ketiga, dia mengatakan 'Anda akan berhadapan dengan kami Polres Pringsewu'. Wah ini mengerikan. Apakah Polres Pringsewu yang dipimpin Yunus Saputra itu semacam kelompok preman yang sedang terganggu lahan backingannya seperti para preman parkir di pasar-pasar? Arogan sekali. Orang ini sangat tidak layak menjadi pimpinan di institusi Polri!

Keempat, dalam voice note itu juga terdengar dia mengatakan 'Anda yang memaksa membocori anggaran negara untuk perut Anda sendiri'. "Hey boss, buka mata, telinga, dan otakmu wahai kapolres otak dungu! Opo kowe ora paham bahwa kebocoran dana negara yang mencapai lebih dari 30 persen setiap tahun terjadi dimana-mana karena kurangnya pengawasan dari masyarakat dan pers? Apalagi kebocoran dana di institusi Polri dan TNI yang lebih parah dari lembaga lainnya akibat sangat tertutup dari pantauan masyarakat dan wartawan," terang Wilson Lalengke dengan nada sinis.

Kelima, si Yunus Saputra juga mengatakan 'bukan untuk memperturutkan kekejian Anda'. What? Kekejian apa yang telah dilakukan oleh warga wartawan sehingga keluar diksi kotor semacam ini dari mulut seorang polisi level perwira menengah? Wilson Lalengke menilai Kapolres Yunus Saputra benar-benar konyol dan tolo!

Keenam, Kapolres Pringsewu dengan nada arogan mengatakan 'Ini adalah peringatan terakhir'. "Ini polisi berjiwa preman, tidak layak jadi polisi, harus diberhentikan sebelum terlambat!" tukas Wilson Lalengke singkat.

Dan poin ketujuh yang menurut tokoh pers nasional itu sangat tidak pada tempatnya adalah kalimat 'Segera keluar dari wilayah saya'. "Pertanyaan saya sederhana, apakah daerah Pringsewu itu miliknya si wereng coklat bernama Yunus Saputra sehingga dia bisa sewenang-wenang dan searogan itu mengusir warga dari daerah mereka? Kacau otaknya neh manusia berbaju polisi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo wajib mengganti orang ini sesegera mungkin!" tegas Wilson Lalengke mengakhiri keterangannya. *(TIM/Red)*

---oOo---



Exclusive News-Jakarta

Persatuan Pemuda Warga Indonesia (PPWI) akhirnya mencabut gugatan Pra-peradilan (Prapid) terhadap Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dalam kasus dugaan kesalahan prosedur penetapan tersangka dan penahanan atas diri wartawati Indragiri Hilir, Rosmely, oleh Kapolres Inhil beberapa waktu lalu. Pencabutan gugatan Prapid tersebut dilakukan dalam sidang hari pertama yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 25 November 2024.

Hal itu disampaikan Penasehat Hukum PPWI, Advokat Ujang Kosasih, S.H., kepada media ini usai menghadiri sidang Prapid yang dilaksanakan di Ruang Dr. Mr. Kusumah Atmaja, PN Jaksel. “Berdasarkan pertimbangan bahwa telah terjadi proses perdamaian antara pelapor Saruji dengan klien kami, Rosmely, melalui restorative justice beberapa waktu lalu, maka Tim PH dan klien kami, Rosmely,

yang didukung oleh jajaran pengurus pusat PPWI, pada sidang hari pertama tadi, kami nyatakan mencabut gugatan Prapid terhadap Kapolri, Kapolda Riau, dan Kapolres Inhil, yang kami daftarkan pada tanggal 01 November 2024 lalu,” jelas advokat senior kelahiran Banten itu sambil menambahkan bahwa sudah tidak ada alasan signifikan untuk melanjutkan gugatan Prapid tersebut.

Di samping Advokat Ujang Kosasih, S.H., hadir juga rekan sesama PH PPWI, Advokat H. Alfani Sari, S.H., M.H., M.M.; Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA; serta beberapa pengurus dan anggota PPWI. Selain itu, terlihat hadir di ruang sidang wartawan Rosmely yang tidak lain adalah Ketua DPC PPWI Inhil yang menjadi korban kriminalisasi dedengkot pungli Saruji bersama delapan organisasi pers pelacur jurnalisme di Inhil dan diamankan oleh oknum Kasatreskrim Polres di daerah tersebut.

Sementara itu pihak Tergugat I, Kapolri; Tergugat II, Kapolda Riau; dan Tergugat III, Kapolres Inhil, mengirimkan masing-masing 3 (tiga) orang personil anggota Polri dari unitnya masing-masing, hadir mewakili pimpinannya untuk menghadapi gugatan dari PH PPWI. Total perwakilan tergugat adalah 9 (sembilan) personil polisi.

Usai hakim tunggal yang mengadili perkara tersebut membuka persidangan, selanjutnya dilakukan proses verifikasi dan validasi identitas dari masing-masing perwakilan, baik dari pihak PH PPWI sebagai penggugat Prapid maupun dari jajaran perwakilan tergugat. Dalam persidangan ini, ternyata personil polisi dari unit Divisi Hukum Polri yang ditugaskan mewakili Kapolri belum mengantongi Surat Kuasa dari Kapolri sebagai Tergugat I.

Walaupun sedianya persidangan perlu ditunda hingga para perwakilan tergugat dapat hadir dengan mengantongi surat kuasa dari prinsipalnya (kliennya), namun persidangan tetap dilanjutkan untuk mendengarkan pernyataan dari pihak penggugat Prapid. Perwakilan penggugat, Advokat Ujang Kosasih selanjutnya menyampaikan bahwa melalui persidangan ini, pihak penggugat Prapid mencabut gugatannya dengan pertimbangan kliennya Rosmely telah dibebaskan oleh Polres Indragiri Hilir melalui mekanisme restorative justice.

Pernyataan pencabutan gugatan Prapid ini disambut baik dan disetujui oleh para tergugat dengan penuh gembira dan sukacita. Hal itu terlihat dari senyum semringah dan raut wajah yang tiba-tiba berubah cerah dari sebelumnya yang tampak kusam dan penuh beban sejak masuk ke dalam ruang sidang.

Setelah membacakan hasil persidangan yang pada intinya penggugat Prapid telah mencabut gugatannya dan pengadilan memutuskan menerima pencabutan gugatan, hakim tunggal atas perkara nomor: 112/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel mengetuk palu sebagai penanda persidangan selesai. Para pihak, penggugat dan tergugat, selanjutnya bersalam-salaman satu sama lainnya dengan penuh keakraban dan persahabatan.

Dalam konferensi pers yang dilakukan di halaman PN Jakarta Selatan, Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke, mengatakan bahwa persidangan Prapid ini dimaksudkan untuk menjadi pembelajaran bersama, baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat banyak. “Kita perlu terus membenahi penerapan peraturan dengan benar sesuai koridor hukum yang dibuat oleh negara ini, tidak sewenang-wenang atau sesuai kehendak pihak tertentu. Oleh karena itu maka setiap warga negara harus selalu kritis dan berani mengkritisi penerapan hukum yang tidak benar, jika perlu melalui jalur Praperadilan,” terang alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu sambil menambahkan bahwa Prapid hari ini adalah salah satu contoh bagi masyarakat Indonesia dalam melakukan koreksi dan perbaikan terhadap penegakan hukum di negara yang kita cintai ini.

Pada kesempatan yang sama, Rosmely menyampaikan harapan agar peristiwa yang dialaminya, terutama terkait proses Praperadilan hari ini hendaknya menjadi pelajaran bagi masyarakat Riau, khususnya Indragiri Hilir, agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang. “Saya berharap ke depan tidak ada lagi Mely-Mely berikutnya yang harus mengalami nasib dikriminalisasi oleh oknum-oknum tertentu. Oleh karena itu, marilah kita bekerja, melaksanakan tugas masing-masing dengan baik dan benar sesuai peraturan hukum yang berlaku,” ujarnya berharap. *(TIM/Red)*

Yusami S.I.K., M.I.K. Pihak pelapor, Ketua Umum PPWI kemudian diundang oleh penyidik Haji Yusami ke Mabes Polri untuk koordinasi dan melengkapi berkas yang diperlukan.

Berdasarkan undangan dari Dittipidkor, Ketum PPWI Wilson Lalengke bersama Penasehat Hukum PPWI, Advokat Dolfie Rompas, mendatangi Dittipidkor Bareskrim Polri dan bertemu penyidik AKBP Haji Yusami pada Selasa, 27 Agustus 2024. Pertemuan berlangsung cukup alot, namun kemudian penyidik bersedia menerima tambahan dokumen berupa kwitansi dugaan penerimaan uang oleh pejabat BUMN dari pengurus PWI. Penyidik juga berjanji akan menindaklanjuti kasus itu secara professional.

Selang sebulan kemudian, Wilson Lalengke menghubungi penyidik Haji Yusami untuk menanyakan perkembangan penanganan kasus yang memalukan bagi dunia pers Indonesia itu. Seperti biasa, penyidik menjanjikan akan mengirimkan surat pemberitahuan penanganan kasus, yang oleh masyarakat umum dikenal dengan nama Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP).

“Sejak saat itu, saya beberapa kali lagi menanyakan SP2HP terkait perkembangan penanganan kasus tersebut, namun tidak pernah diberikan. Penyidik AKBP Haji Yusami hanya menjanjikan akan memberikan segera. Hingga pada hari Minggu, 17 November lalu, saya menanyakan melalui pesan WhatsApp terkait janji AKBP Haji Yusami yang katanya akan mengirimkan SP2HP-nya segera,” ungkap tokoh pers nasional itu kepada media ini, Minggu, 24 November 2024.

Yang bersangkutan (Haji Yusami – red) membalas pesan Wilson Lalengke dengan mengatakan bahwa: ‘Sudah dikirimkan oleh anggota surat pemberitahuan dumasnya.’

“Sayapun langsung bertanya ‘Kapan dikirimkan? Belum tiba di alamat hingga saat ini. Semoga dalam 1-2 hari ini sudah sampai di sini yaa, terima kasih sebelumnya.’ Saya berusaha berkomunikasi dengan selembut mungkin walau hati saya sedang jengkel karena janji-janji yang tidak dipenuhi,” tambah Wilson Lalengke.

Atas pertanyaan tersebut, AKBP Haji Yusami langsung merespon dengan menjawab, 'Hari Jumat (15 November 2024 – red) jika tidak salah. Ditunggu saja.'

Namun, ditunggu hingga hari Jumat berikutnya, tanggal 22 November 2024, yang berarti sudah seminggu berlalu dari hari pengiriman surat tersebut, belum ada surat pemberitahuan dumas sebagaimana dijanjikan oleh polisi level perwira menengah itu ke alamat Wilson Lalengke. "Padahal jarak antara Mabes Polri di Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan rumah saya di Jl. Anggrek Cenderawasih X, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, hanya 15 menit berkendara roda dua," terangnya dengan nada kesal.

Fakta ini, kata Wilson Lalengke lagi, menunjukkan sikap dan perilaku buruk dari anggota Polri bernama Haji Yusami itu yang menyepelekan dirinya sebagai rakyat. "Dia juga jelas-jelas melecehkan saya sebagai pelapor dan penyelamat uang rakyat, dia sebagai pelayan rakyat memandang remeh masyarakat seperti saya, yang tentu saja terjadi juga terhadap warga lainnya. Dia tidak sadar diri bahwa hidupnya dibiayai oleh rakyat, namun tidak mampu memberikan pelayanan yang baik kepada rakyat dan menghargai masyarakat," tegasnya sambil menambahkan bahwa lebih buruk lagi, yang bersangkutan terbiasa berbohong, tidak amanah, mudah berjanji tapi ingkar, yang tidak semestinya menjadi sifat dan karakter seorang polisi yang bergelar Haji dan penceramah agama di berbagai kesempatan, termasuk di masjid-masjid.

Pada intinya, masih menurut wartawan senior tersebut, pihaknya merasa dirugikan atas janji-janji yang bersangkutan yang tidak pernah ditepati untuk memberikan informasi perkembangan penanganan pengaduannya terkait dugaan korupsi dan/atau penggelapan dana rakyat, dana hibah BUMN, yang dikorupsi pihak-pihak tertentu. "Saya merasa dilecehkan, dihinakan, disepelekan, dipandang tidak penting dan boleh diacuhkan begitu saja oleh polisi yang adalah pelayan rakyat, aparat negara yang celana dalamnya saja dibeli oleh rakyat," ujar Wilson Lalengke.

Kesal di-PHP (pemberi harapan palsu – red) terus-terusan, alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini melayangkan laporan pengaduan masyarakat ke Kepala Divisi Propam Polri. Lapdumas tersebut telah diterima petugas Divpropam Polri, Hendra Safrianto Hutabarat, NRP 833091030, dengan bukti Surat Penerimaan Pengaduan Propam Nomor: SPSP2/005681/XI/2024/BAGYANDUAN, tertanggal 22 November 2024.

“Saya berharap Kapolri konsisten dengan ucapannya akan memproses setiap anggotanya yang tidak becus bekerja. Bahkan Presiden Prabowo sudah menginstruksikan agar para pejabat dan aparat yang tidak mampu bekerja melayani rakyat segera dirumahkan saja, masih banyak anak-anak bangsa ini yang mau bekerja dengan benar dan profesional,” jelas Wilson Lalengke sambil berharap Lapdumas Propam yang dilanyangkannya menjadi perhatian dan diproses sebagaimana mestinya agar jajaran anggota Polri tidak terbiasa berbohong dan ingkar janji, serta menghargai setiap anggota masyarakat yang adalah warga negara pembayar pajak untuk menggaji para polisi di negeri ini. *(APL/Red)*

---oOo---



Bercermin dari Wilson Lalengke, Pemimpin Sejati yang Melindungi Anggota tanpa Batas

Oleh: Muhammad Adam, S.H.

Exclusive News-Makassar

Kepemimpinan bukan hanya tentang mengarahkan atau mengendalikan, tetapi juga tentang melindungi, memperjuangkan, dan bertanggung jawab terhadap mereka yang berada di bawah naungan kita. Seorang pemimpin sejati adalah seseorang yang tidak hanya memikirkan keuntungan pribadi atau kekuasaan, tetapi lebih mengutamakan kesejahteraan dan keamanan orang-orang yang dipimpinnya. Salah satu contoh pemimpin yang mencerminkan prinsip ini adalah Wilson Lalengke, pemimpin PPWI (Persatuan Pewarta Warga Indonesia) Pusat Jakarta.

Wilson Lalengke adalah sosok yang dikenal dengan keteguhannya dalam memperjuangkan hak-hak jurnalis dan anggota organisasi yang ia pimpin. Sama seperti induk singa yang rela berlumuran darah dan kehilangan satu taringnya demi melindungi anak-anaknya, Wilson Lalengke juga tidak ragu untuk bertarung melawan berbagai rintangan dan bahaya demi kesejahteraan dan keamanan anggotanya. Dalam dunia jurnalistik yang penuh tantangan, di mana sering kali ancaman terhadap kebebasan berbicara atau keselamatan para jurnalis datang dari berbagai pihak, seorang pemimpin seperti Wilson Lalengke sangat dibutuhkan.

Pemimpin yang baik bukan hanya yang memimpin dengan kata-kata, tetapi yang juga memimpin dengan tindakan. Seperti induk singa yang tidak segan-segan bertarung dengan siapapun yang mengancam keluarganya, Wilson Lalengke menunjukkan bahwa kepemimpinan yang sejati adalah tentang berkorban dan melindungi, bahkan jika itu berarti harus kehilangan sebagian dari diri kita. Dalam berbagai kesempatan, Wilson Lalengke telah menunjukkan bahwa ia siap untuk menghadapi berbagai tantangan yang datang demi menjaga dan melindungi anggota PPWI dari berbagai ancaman, baik itu ancaman fisik, hukum, maupun sosial.

Dalam dunia jurnalisme, ancaman terhadap keselamatan sering kali datang dari berbagai arah, mulai dari tekanan politik, intimidasi hukum, hingga ancaman fisik yang nyata. Wilson Lalengke tidak hanya bertindak sebagai seorang pemimpin yang memberikan arahan, tetapi juga sebagai pelindung bagi anggotanya. Ia selalu menempatkan kepentingan dan keselamatan anggotanya di atas segalanya. Tidak jarang, ketika anggotanya menghadapi kesulitan atau ancaman, Wilson Lalengke akan turun tangan langsung, membela mereka, dan berjuang untuk memastikan bahwa hak-hak mereka tetap terjaga.

Sikap Wilson Lalengke yang berani dan tidak gentar menghadapi berbagai bentuk ancaman ini sangat mencerminkan prinsip kepemimpinan yang sejati. Seperti induk singa yang meski terluka, tetap melindungi anak-anaknya dengan penuh kasih sayang dan keteguhan, Wilson Lalengke berusaha keras untuk melindungi

anggotanya, bahkan jika itu berarti ia harus berhadapan langsung dengan kekuatan yang jauh lebih besar atau lebih berbahaya.

Seorang pemimpin yang baik bukan hanya bertanggung jawab atas keberhasilan, tetapi juga atas kegagalan. Wilson Lalengke menyadari betul bahwa sebagai pemimpin, ia harus memikul beban yang sangat berat, terutama ketika anggota organisasi menghadapi kesulitan atau ketidakadilan. Dalam hal ini, dedikasi dan komitmen Wilson Lalengke terhadap anggota PPWI sangat jelas. Ia tidak hanya memberikan dukungan moral, tetapi juga siap melakukan segala cara untuk memastikan bahwa anggotanya tidak dibiarkan sendiri ketika menghadapi situasi sulit.

Sikap ini sangat penting dalam dunia yang penuh ketidakpastian dan ketegangan, di mana banyak pihak berusaha memanfaatkan ketidakberdayaan orang lain. Dalam hal ini, Wilson Lalengke membuktikan bahwa seorang pemimpin harus siap melakukan apa pun, termasuk mengorbankan kepentingannya sendiri, demi memastikan anggotanya tetap dalam perlindungan dan dapat menjalankan tugasnya dengan aman.

Seperti induk singa yang meski kehilangan taringnya tetap bertarung demi anak-anaknya, Wilson Lalengke juga memiliki prinsip kepemimpinan yang mengedepankan pengorbanan. Dalam dunia jurnalistik yang terkadang penuh dengan risiko, seorang pemimpin harus rela mempertaruhkan diri untuk melindungi anggotanya. Tidak jarang, demi melindungi anggota PPWI yang menghadapi tekanan luar biasa, Wilson Lalengke mengambil risiko pribadi dan menghadapinya dengan kepala tegak.

Kepemimpinan yang mengorbankan diri demi orang lain adalah jenis kepemimpinan yang patut dihargai dan dicontoh. Wilson Lalengke tidak hanya menunjukkan prinsip tersebut dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan nyata. Ia berani berhadapan dengan tantangan, meskipun itu berarti ia harus menerima kerugian atau menghadapi risiko besar. Prinsip inilah yang menjadikan Wilson Lalengke seorang pemimpin yang kuat, dihormati, dan diandalkan oleh anggotanya.

Wilson Lalengke adalah seorang pemimpin yang mampu menggabungkan keberanian, dedikasi, dan pengorbanan dalam setiap langkah kepemimpinannya. Seperti induk singa yang tak kenal takut dan siap berkorban demi anak-anaknya, Wilson Lalengke menunjukkan bahwa seorang pemimpin sejati akan mempertaruhkan apapun demi melindungi anggotanya. Kepemimpinan yang demikian tidak hanya membangun rasa kepercayaan dan loyalitas di antara anggota, tetapi juga menginspirasi mereka untuk terus berjuang demi kebenaran dan keadilan, meskipun tantangan dan rintangan datang silih berganti.

Dengan prinsip kepemimpinan yang tegas, berani, dan penuh pengorbanan, Wilson Lalengke telah membuktikan bahwa menjadi pemimpin sejati bukanlah tentang mengejar kekuasaan, melainkan tentang melindungi dan memperjuangkan mereka yang dipercayakan kepadanya. Inilah prinsip kuat Wilson Lalengke yang menjadikannya seorang pemimpin yang bukan hanya dihormati, tetapi juga dicintai dan dipercaya oleh anggotanya. (*)

(Tulisan ini telah dimuat di media online WartaPolri.Co.Id di bawah judul: Seorang Pemimpin Sejati, Prinsip Kuat Wilson Lalengke yang Seperti Induk Singa Berlumuran Darah dan Kehilangan Satu Taringnya demi Melindungi Anggotanya)

Penulis adalah kolumnis berbagai media online, Pemimpin Redaksi WartaPolri.Co.Id

---oOo---



Indonesia Negerinya Polisi, Rakyat Numpang Nonton

Oleh : Wilson Lalengke

<https://majalahdekade.tomsbook.co.id>

Exclusive News, Jakarta

Dunia publikasi media massa, termasuk media sosial dan jejaring whatsapp, Indonesia saat ini hanya dipenuhi berita tentang polisi. Secara sepintas, dari bangun tidur hingga ke bangun tidur hari berikutnya, tayangan yang menjadi tontonan dan bacaan masyarakat, melulu soal polisi. Uniknya, pemberitaan itu bukan hanya soal polisi menindak warga (yang seringkali adalah kriminalisasi warga oleh polisi), namun sebagian besarnya adalah terkait penindakan polisi terhadap polisi.

Belum kering ingatan publik soal polisi Sambo yang bunuh polisi, disusul dengan penanganan polisi terhadap kasus yang melibatkan ratusan polisi itu; kini ada lagi polisi bunuh polisi. Kalau Sambo yang

jenderal bunuh anak buahnya yang berpangkat jauh di bawahnya, kasus polisi terbaru justru sesama perwira berpangkat AKP yang terlibat jadi pembunuh dan korban pembunuhan. Bedanya, yang satu lulusan akademi kepolisian dan masih usia muda, yang satu hanya lulusan sekolah menengah dan nyaris pensiun.

Belum lama berselang, viral kasus kecelakaan yang melibatkan dua mobil polisi yang saling bertabrakan. Mungkin kita bisa berargumen, namanya juga manusia, suatu hal yang biasa jika terjadi tabrakan antar kendaraan polisi. Persoalannya, tidak sesederhana itu. Polisi adalah orang-orang terlatih dan dipandang memiliki pengetahuan yang lebih mumpuni soal aturan berlalu-lintas dibandingkan warga biasa, sehingga polisi tabrak polisi menjadi sesuatu yang unik sekaligus memalukan.

Ada lagi berita tempo hari, polisi bakar polisi yang adalah suaminya sendiri. Sadis memang. Tapi dari penelusuran motif kasusnya, ternyata si polisi laki punya kebiasaan buruk, berjudi online alias judol. Dan, nyatanya dari temuan terbaru, ratusan ribu anggota Polri (plus TNI) terjerat kegiatan judol ini. Judi yang dulunya merupakan penyakit masyarakat kelas bawah, di era digital saat ini, judi naik kelas menjadi penyakit para elit berseragam. Hebat!

Tulisan sekenanya ini diinspirasi oleh komentar seorang teman atas peristiwa tragis penembakan Kasatreskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil oleh Kabagops pada Polres yang sama, AKP Dadang. Komentar singkat kawan ini unik tapi nyeleneh sekaligus menggelikan. “Dengar polisi mati ditembak polisi, rakyat bergembira, horee...”

Inilah Indonesia kini, seakan negeri ini hanya milik polisi dengan segala dinamika dan persoalannya. Indonesia yang dikuasai komunitas polisi untuk kepentingan primordialnya sendiri, tidak lagi menjadi pelayan yang diharapkan rakyat. Polisi Indonesia hanya menggunakan kekuasaan dan kewenangan sebagai penegak hukum untuk menggendutkan perut diri sendiri dan keluarganya, plus kroni-kroni mafiosonya.

Rakyat sudah tercerabut dari negerinya, Indonesia. Ini mungkin kenyataan pahit yang tak akan diakui oleh kebanyakan kita. Tapi jika

saja diberikan peluang, maka semua warga akan memilih tempat yang jauh dari gangguan polisi, jauh dari hiruk-pikuk pemberitaan tentang polisi kriminal yang jumlahnya naudzubillah banyaknya bertebaran di se-antero nusantara ini. Jauh dari perilaku kriminal polisi yang menyengsarakan rakyat dimana-mana, jauh dari gerombolan mereka yang dijuluki wereng coklat itu.

Dalam ketidak-berdayaannya, terpaksa rakyat di negeri ini berusaha duduk tenang menunggu hari malam, ngopi sambil menonton polisi bunuh polisi, polisi bakar polisi, polisi tabrak polisi, polisi tangkap polisi nyabu dan judol, dan lain sebagainya dan seterusnya, sambil tertawa girang: horeee... polisi mati lagi, hahah. (*)

Penulis adalah korban kriminalisasi polisi Polres Lampung Timur

---oOo---



Exclusive News, Indragiri Hilir

Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Haji Herman atas terpilihnya sebagai Bupati Indragiri Hilir (Inhil) periode 2025-2030. Kemenangan Haji Herman dalam Pilkada 2024 disambut dengan penuh syukur dan doa dari berbagai pihak, termasuk dari keluarga besar PPWI.

“Assalamu'alaikum Pak Haji Herman, selamat yaa atas keberhasilannya dalam Pilkada 2024 ini. Doa kami di PPWI, semoga Allah SWT menyertai dan merahmati Pak Bupati Inhil, Bapak Haji Herman, bersama Wakil Bupati, Ibu Yuliantini. Kami berharap

kepemimpinan Bapak dan Ibu berjalan lancar dan sukses dalam menjalankan amanah dari rakyat Indragiri Hilir. Aamiin YRA". Demikian disampaikan Wilson Lalengke melalui pesan WhatsApp-nya ke jejaring pertemanan PPWI Inhil, Rabu, 27 November 2024, setelah dirinya menyimak perolehan suara sementara Pilkada Kabupaten Indragiri Hilir melalui situs resmi KPU.

Kemenangan ini, tambah wartawan senior itu, diharapkan membawa perubahan positif bagi Indragiri Hilir. Warga menaruh harapan besar kepada Bapak Haji Herman dan Ibu Yuliantini untuk menjalankan program-program yang membawa kemajuan bagi daerah dan kesejahteraan masyarakat Inhil.

Dari pengamatan sekilas di 20 Kecamatan di Inhil, Haji Herman yang berpasangan dengan Yuliantini memenangi perolehan suara di semua Kecamatan tersebut. Bahkan perolehan suara pasangan Cabup-Cawabub Inhil nomor urut 4 itu rata-rata kecamatan di atas 65 persen, jauh dari perolehan suara 3 paslon lainnya. Data detailnya dapat dilihat di situs resmi KPU ini:

<https://pilkada2024.kpu.go.id/pilwalkot/riau/indragiri-hilir/>.

"Prediksi saya, pasangan Herman-Yuliantini meraih suara di atas 65 persen, bisa jadi ini adalah presentase perolehan suara tertinggi di Indonesia untuk pilkada tahun 2024," kata alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Selamat kepada Bapak Haji Herman dan Wakil Bupati terpilih, Ibu Yuliantini! Sukses selalu dalam mengemban amanah rakyat. (TIM/Red)

---oOo---



Kompas Siarkan Berita Menyesatkan tentang Konservasi Badak Jawa, Berikut Keterangan Balai TNUK

<https://majalahdekade.tomsbook.co.id>

Exclusive News, Pandeglang

Media Kompas.Com ternyata tidak seperti tagline ‘independen dan terpercaya’ yang digembar-gemborkan selama ini. Pasalnya, dalam pemberitaan terkait Konservasi Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), media ini dengan fulgar menampilkan informasi yang tidak akurat, tidak valid, tidak benar, bahkan merupakan kebohongan yang menyesatkan.

Hal itu tergambar dari penjelasan yang dipaparkan pihak Balai TNUK melalui siaran pers setebal 11 halaman yang diterima media ini, Sabtu, 23 November 2024. Kepala Balai TNUK menyatakan sangat prihatin dan menyayangkan keteledoran pemberitaan yang dilakukan

media sekelas Kompas yang selama ini dianggap sebagai rujukan berita di tingkat nasional.

Selain media partisan Kompas.Com dan jaringannya, terdapat dua media lainnya yang ikut menyiarkan berita sesat terkait pengelolaan TNUK tersebut. Mereka adalah BantenNews.Co.Id dan IDNTimes.Com. Pemberitaan ketiga media ini memang berasal dari satu sumber yang sama, hanya berbeda tanggal penerbitan, pengolahan kata dan fasa, serta kalimat dan penekanan informasi, yang dimodifikasi sesuai patronase masing-masing media.

Secara singkat, berdasarkan keterangan rinci dalam siaran pers yang diterbitkan Balai TNUK, terdapat setidaknya 11 poin kebohongan dan informasi sesat yang termuat pada pemberitaan media Kompas.Com, BantenNews.Co.Id, dan IDNTimes.Com.

Menilik kesebelas poin informasi sesat yang diberitakan ketiga media tersebut, Kepala Balai TNUK, Ardi Andono, S.TP, M.Sc, membantah dengan tegas dan menyatakan bahwa beritanya tidak benar alias bohong dan menyesatkan. Siaran Pers Balai TNUK selengkapnya dapat diakses di sini:

<https://tnujungkulon.menlhk.go.id/berita/detail/280>.

Kompas.Com misalnya, dalam pemberitaannya di tanggal 15 September 2024 yang berjudul 'Carut Marut Proyek Konservasi Badak Jawa, Dana Habis Rp 188 M, Fasilitas Terbengkalai' sebagaimana dapat di akses pada tautan <https://regional.kompas.com/read/2024/09/15/102139278/carut-marut-proyek-konservasibadak-jawa-dana-habis-rp-188-m-fasilitas?page=all> ini, pihak Balai TNUK menyatakan keberatan dan menyebutkan judul tersebut menyesatkan. "Tanggapan kami, judul ini menyesatkan dan tidak benar, total dana SBSN (Surat Berharga Syariah Negara-red) tahun 2019, 2021-2022 adalah Rp. 130.222.665.413,- Demikian juga soal fasilitas yang dikatakan terbengkalai, ini sangat menyesatkan karena faktanya fasilitas yang dibangun dari dana tersebut saat ini masih digunakan dan berfungsi dengan baik," demikian tulis pihak Balai TNUK dalam press release yang diterbitkan pada Jumat, 22 November 2024.

Demikian juga dalam pemberitaan media BantenNews.Co.Id tertanggal 12 September 2024 dengan judul ‘Proyek Mangkrak Penyelamatan Badak’ yang dapat dilihat di tautan <https://www.bantennews.co.id/investigasi-proyekmangkrak-penyelamatan-badak> ini, pihak Balai TNUK menilai bahwa media tersebut tidak memahami apa yang mereka investigasi dan beritakan. Balai TNUK mengharapkan publik tidak termakan isu-isu bohong dan menyesatkan yang disebarakan media-media partisan semacam ini.

“Judul yang diangkat media BantenNews di atas itu terkait proyek mangkrak tidak benar sama sekali. Faktanya, bangunan SBSN saat ini masih digunakan dan tetap berfungsi dengan baik,” tegas Ardi Andono dalam pernyataan persnya.

Media IDNTimes.Com lebih parah lagi. Terbitan berita tertanggal 16 September 2024, IDNTimes menulis dengan judul “Proyek Main-main Pengamanan Badak Jawa, Proyek Sarana JRSCA Terbengkalai, Badak Jawa terancam”. Berita tersebut dapat dilihat di sini: <https://banten.idntimes.com/news/banten/khairil-anwar-11/proyek-main-main-pengamananbadak-jawa-c1c2?page=all>

“Tanggapan kami adalah bahwa judul di atas tidak benar. Penyelamatan Badak Jawa dalam bentuk JRSCA (Java Rhino Study and Conservation Area – red) telah diinisiasi sejak tahun 2007, dan dimatangkan dengan dokumen-dokumen yang sah. Sarana prasarana JRSCA dan bangunan yang ada untuk keperluan penelitian dan konservasi tersebut masih dimanfaatkan dan digunakan dengan baik”. Demikian sebagaimana dikutip dari lembaran siaran pers yang diterima media ini.

Pada bagian keterangannya yang lain, pihak Balai TNUK juga tak menampik tentang adanya kendala dan tantangan berat yang sempat dihadapi dalam pengelolaan dan pelaksanaan program konservasi di wilayah kerjanya. Badai Covid-19 dan bencana gempa bumi yang terjadi di periode tahun anggaran 2020-2022 cukup mengganggu kinerja mereka. Meskipun demikian, fasilitas konservasi yang sudah dibangun selama ini masih dapat diberdayakan dan rencana kerja Balai TNUK secara umum masih dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Kepala Balai TNUK, Ardi Andono, juga menyampaikan bahwa tulisan ketiga media tersebut berasal dari para wartawan Klub Jurnalis Investigasi Banten dengan tujuan awal untuk diikutkan dalam ICW Award. Perlu diketahui, Klub Jurnalis Investigasi (KJI) berdasarkan video dan liputannya, melakukan investigasi masuk ke dalam kawasan konservasi Taman Nasional Ujung Kulon, yakni di Tanjung Lame, Rancapinang, dan Legon Pakis.

Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Nomor P.7/IV-Set/2011 tentang tata cara penerbitan Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI), setiap pengunjung yang masuk ke dalam kawasan harus menempuh prosedur Ijin Masuk Kawasan. Dan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, setiap pengunjung dikenai pungutan PNBP.

Dalam kasus ini, KJI tidak menempuh administrasi tersebut, sehingga kami menyatakan bahwa KJI melakukan tindakan ilegal di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon dan melanggar aturan. Dengan demikian validitas hasil investigasi yang didapatkan dikategorikan cacat hukum, yang oleh karena itu pernyataan KJI pun cacat hukum. Atas dasar tersebut diduga kuat KJI telah melanggar kode etik jurnalis dalam mendapatkan informasi/data dan dalam memberitakan di media-media tersebut di atas.

Perlu juga ditegaskan di sini bahwa kegiatan pembangunan SBSN tahun 2019 telah diaudit oleh BPK RI, didampingi oleh Inspektorat Jenderal KLHK, dan juga bersama Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Pandeglang. Demikian juga untuk pembangunan SBSN tahun 2021-2022, telah diaudit oleh BPK RI dan didampingi oleh Inspektorat Jenderal KLHK, sehingga akuntabilitas pembangunan sarana prasarana SBSN di TNUK dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian hak jawab kami sampaikan, agar publik mengetahui kebenaran yang ada, dan kepada seluruh redaksi diwajibkan mencantumkan hak jawab ini di media online yang saudara pimpin dan

meminta maaf kepada kami karena memberitakan informasi dan data yang tidak valid, tidak benar dan menyesatkan. (TIM/Red)

Video pernyataan Kepala Balai TNUK dan keterangan para pihak terkait dapat disimak di sini: <https://youtu.be/6Gxs97PzyjQ> dan di sini: <https://youtu.be/CBLc31S8tYs>

---oOo---



Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke Angkat Bicara Terkait Ancaman Pembunuhan Terhadap Tim PT Berita Istana Negara

Exclusive News -Jakarta

Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., MA, angkat bicara terkait kasus ancaman pembunuhan yang menimpa tim PT Berita Istana Negara oleh seseorang berinisial AAP di Pasuruan, Jawa Timur. Dalam pernyataannya, Wilson mengemukakan keras tindakan tersebut yang dinilainya sebagai bentuk intimidasi terhadap kebebasan pers.(Rabu 20 November 2024).

“Kejadian ini adalah ancaman serius bagi kebebasan pers di Indonesia. Kami meminta pihak berwenang segera menangkap dan memproses hukum pelaku ancaman pembunuhan ini. Pers memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang aktual dan terpercaya kepada masyarakat, sehingga harus dilindungi,” tegas Wilson Lalengke.

Selain itu, Wilson juga memberikan apresiasi kepada Mas Warsito, Direktur Utama PT Berita Istana Negara, atas semangat dan dedikasinya dalam menjalankan tugas jurnalistik. Ia juga mengapresiasi solidaritas yang ditunjukkan oleh 88 media online yang turut memberitakan kasus ini.

“Kami sampaikan penghargaan tinggi atas kekompakan dan solidaritas dari para media yang ikut bersuara dalam kasus ini. Tetap semangat kepada Mas Warsito dan timnya, teruslah memberikan informasi yang terpercaya dan berkualitas kepada masyarakat,” ujar Wilson.

Sebagai lulusan LEMHANAS tahun 2012, Wilson dikenal sebagai tokoh yang konsisten membela anggota PPWI dalam menjalankan tugas jurnalistik. Ia menegaskan bahwa PPWI akan terus mendukung anggota yang menghadapi ancaman atau intimidasi dalam menjalankan profesinya.

“PPWI berdiri untuk melindungi dan memperjuangkan hak para wartawan warga. Kami tidak akan tinggal diam terhadap ancaman seperti ini,” tambahnya.

Kasus ancaman pembunuhan ini telah menjadi perhatian publik dan diharapkan segera mendapatkan keadilan melalui penegakan hukum yang tegas dan adil. *(TIM : Red)*

---oOo---



Pelatih Fisik Persatuan Gulat Indonesia (PGSI) Mengadu ke Ketum PPWI, Terkait Bonus Pelatih yang Tidak Dibayar

<https://majalahdekade.tomsbook.co.id>

Exclusive News, Jakarta

Pelatih Fisik Persatuan Gulat Indonesia (PGSI) Achmad Syaifullah mengadu ke Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI) di Jakarta pada, Kamis 21 November 2024. Pengaduan tersebut terkait bonus pelatih yang tidak dibayar pada pertandingan Sea Games Tahun 2023 lalu.

Dalam keterangannya Achmad Syaifullah yang kerap di panggil Coach Ipul sebagai pelatih fisik menceritakan kepada Ketum PPWI Bapak Wilson Lalengke bahwa dalam pertandingan Sea Games tahun 2023, atlet cabang olahraga gulat yang ia latih berhasil meraih medali emas sebanyak 6 buah, medali perak sebanyak 6 buah, dan medali perunggu sebanyak 2 buah. "Saya mendapat data informasi tersebut dari Website: DataIndonesia.id bahwa setiap perolehan medali emas untuk pelatih perorangan sebesar Rp.210.000.000 (dua ratus sepuluh

juta rupiah) untuk medali perak sebesar Rp.126.000.000, (seratus dua puluh enam juta rupiah) dan untuk perolehan perunggu diberikan sebesar Rp.63.000.000 (enam puluh tiga juta rupiah),” tuturnya.

Selanjutnya, Pelatih Fisik PGSI Achmad Syaifullah S.Pd yang kerap di panggil Coach Ipul menjelaskan bahwa ia tidak menerima bagian dari bonus tersebut, sementara di dalam Surat Keputusan Nomor 03 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Persatuan Gulat Seluruh Indonesia pada 09 Februari 2023 yang ditandatangani Sekjen PGSI Gusti Randa, sangat jelas bahwa Achmad Syaifullah S.Pd sebagai pelatih fisik. Namun dalam kenyataannya yang dialami saat ini, bahwa memang benar Ahmad Syaifullah sampai detik ini belum mendapatkan haknya selaku pelatih fisik di PGSI.

“Saya tetap akan menuntut hak saya sebagai pelatih fisik (coach) PGSI sampai kapanpun dan saya akan menempuh jalur sesuai dengan rencana, dan saya memintak bantuan pendampingan kepada Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pemuda Warga Indonesia (Ketum DPN PPWI) karena sudah setahun lebih belum ada kejelasannya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ahmad Syaifullah merasa senang hati bisa bertemu langsung dengan Ketum DPN PPWI Bapak Wilson Lalengke dan tidak menyangka dalam penyambutannya disambut hangat dan sangat ramah dalam penerimaan terhadap tamu-tamunya. Dalam pengaduan Ahmad Syaifullah di hadapan Ketum PPWI Bapak Wilson Lalengke, ia menceritakan bahwa kronologi tentang masalah yang dialaminya.

“Saya diundang oleh team review Cabor untuk persiapan Sea Games Kamboja Tahun 2023 pada Pada (26/1/2023). Dalam undangan tersebut membahas tentang penilaian bagaimana Cabor Gulat bisa memberikan kontribusi perolehan mendali, dan membahas jumlah atlet yang akan dipersiapkan pada ajang tersebut, pemanggilan atlet mulai dilakukan dan telah disetujui sebanyak 14 atlet dari beberapa kelas yaitu, dua gaya, Grco dan Freestyle untuk mengikuti di Sea Game,” ucapnya.

Achmad Syaifullah juga menjelaskan secara detail bahwa ia bertugas fokus dalam pembentukan dan pembinaan fisik atau lebih

dikenal dengan sebutan Strength Conditioning (SC). Adapun Team Pelatnas gulat training camp bertempat di Hotel Urban 101 Rawamangun Jakarta Timur, dan untuk tempat latihan teknik bertempat di Matraman Jakarta Timur, dan di Stadion Atletik Rawamangun Jakarta Timur. Training camp dilakukan mulai 10 Februari 2023 – 11 Mei 2023, dengan tryout ke Daeggu Korea Selatan selama 21 hari yaitu, 16 April – 7 Mei 2023. Waktu pertandingan Sea Games Cabor Gulat di Kamboja selama 5 Hari dimulai 12-16 Mei 2023).

“Alhamdulillah Cabor gulat memberikan hasil yang baik dengan memperoleh 14 medali dari 14 atlet, pencapaian yang ditunggu selama hampir 26 tahun, dengan perolehan sebagai berikut:

1. Memperoleh medali emas sebanyak 6.
2. Memperoleh medali perak sebanyak 6.
3. Memperoleh medali perunggu sebanyak 2.

Dari perolehan tersebut pemerintah Indonesia memberikan apresiasi kepada para pelatih adapun bonus tersebut berupa uang tunai dengan uraian sebagai berikut:

1. Untuk peraih medali emas pelatih diberikan bonus sebesar Rp.525 juta.
2. Untuk peraih medali perak pelatih diberikan bonus sebesar Rp.315 juta.
3. Untuk peraih medali perunggu pelatih diberikan bonus sebesar Rp.105 juta.

Di samping bonus tersebut di atas PP PGSI juga memberikan tambahan bonus untuk peraih medali emas sebesar Rp.300 juta, untuk peraih medali perak sebesar Rp.200 juta, dan untuk peraih medali perunggu sebesar Rp.100 juta,” ungkapnya.

Selain bonus yang didapat, pelatih juga mendapatkan reward atas perolehan medali tersebut. Namun ada hal yang sangat menyakitkan yang dirasakan dan dialami oleh Achmad Syaifullah sebagai pelatih fisik terkait kedzoliman dan ketidakadilan yang diperlihatkan dari 5 pelatih, hanya satu pelatih fisik/strength conditioning (SC) yang tidak mendapatkan bonus apa-apa.

“Saya berharap kepada Ketua Umum PP PGSI dalam hal ini Bapak Trymedya Panjaitan dapat memikirkan hal tersebut. Keberhasilan dalam hal ini semua mempunyai peran sesuai tugas/jobdesk, sesuai keilmuan yang dimiliki, berikan hak bonus saya, agar sama dengan yang lainnya,” harapnya.

Sementara itu, Ketum PPWI Wilson setelah mendengar cerita dan keluhan dalam pengaduan Achmad Syaifullah selaku pelatih fisik di PP PGSI dalam ajang Sea Game, bahwa ia berjanji akan membantu dan menemui pihak Kemenpora untuk menanyakan masalah Achmad Syaifullah. “Saya akan bantu terkait hal yang diceritakan dari awal hingga akhir dan saya akan bantu untuk komunikasi dengan pihak Kemenpora Deputi IV terkait masalah yang menimpah pelatih fisik Achmad Syaifullah,” pungkasnya. *(Wandy/Red)*

---oOo---



Nelayan Kalimantan Barat Desak Keringanan Retribusi di Tengah Cuaca Buruk

Exclusive News-Kubu Raya, Kalimantan Barat

Sejumlah nahkoda dan pemilik kapal nelayan menghadiri kegiatan Diseminasi Sistem Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Barat dan UPT Pelabuhan Perikanan Pontianak. Dalam forum ini, para nahkoda menyampaikan keluhan mereka terkait tingginya retribusi tambat

labuh kapal perikanan, khususnya selama masa tidak melaut akibat kondisi cuaca buruk.

Nasir Sumito, seorang nahkoda yang mewakili para nelayan, mengungkapkan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, hasil tangkapan ikan menurun drastis akibat cuaca yang tidak mendukung. Hal ini tidak hanya memengaruhi pendapatan nelayan, tetapi juga menyulitkan mereka untuk memenuhi kewajiban pembayaran retribusi tambat labuh di pelabuhan.

“Kami berharap ada keringanan retribusi selama tiga bulan, dari Desember 2024 hingga Maret 2025, mengingat kondisi cuaca buruk yang membuat kami tidak dapat melaut. Jika tidak ada kebijakan yang membantu, kami khawatir usaha perikanan akan semakin terpuruk,” ujar Nasir kepada wartawan.

Permintaan keringanan ini didasarkan pada beban operasional yang terus meningkat, seperti perawatan kapal dan biaya tambat, yang tidak sebanding dengan pendapatan saat ini. Para nelayan berharap pemerintah dapat memahami situasi sulit yang mereka hadapi.

Namun, hingga berita ini ditulis, pihak UPT Pelabuhan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat belum memberikan tanggapan resmi. Kepala UPT sedang berada di luar kota sehingga permintaan para nelayan belum dapat ditindaklanjuti.

Para nelayan mendesak DKP Provinsi Kalimantan Barat untuk segera merespons aspirasi ini. Mereka berharap pemerintah tidak hanya fokus pada modernisasi infrastruktur pelabuhan, tetapi juga memastikan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan nelayan kecil, terutama saat menghadapi tantangan cuaca ekstrem.

Pewarta : JN/98

---oOo---



SEJARAH ADAT DAYAK CUPANG DESA

Tomi, S.Pd.,M.E.





KEJUARAAN MENEMBAK "KHC OPEN" SE-KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

7 - 8 DESEMBER 2024
GOR BUJANG MALAKA SANGGAU

KELAS PERLOMBAAN :

1. Kelas PCP Cal:177/4,5 mm Benchrest 25 Meter
2. Kelas PCP Cal:177/4,5 mm Tripose Metal Silhouette 33 Meter
3. Kelas Uklik (Visir) Cal:177/4,5 mm Tripose Metal Silhouette 17 Meter
(Khusus Kelas Uklik Visir Terbuka Untuk Umum "Penjaringan Atlit")

HADIAH :

Kelas Benchrest 25 Meter

Juara 1 Rp. 3.500.000 • Trophy • Piagam
Juara 2 Rp. 2.500.000 • Trophy • Piagam
Juara 3 Rp. 1.500.000 • Trophy • Piagam

Kelas PCP Tripose 33 Meter Metal Silhouette

Juara 1 Rp. 3.500.000 • Trophy • Piagam
Juara 2 Rp. 2.500.000 • Trophy • Piagam
Juara 3 Rp. 1.500.000 • Trophy • Piagam

Kelas Uklik (Visir) Tripose 17 Meter Metal Silhouette

Juara 1 Rp. 2.000.000 • Trophy • Piagam
Juara 2 Rp. 1.500.000 • Trophy • Piagam
Juara 3 Rp. 1.000.000 • Trophy • Piagam

BIAYA PENDAFTARAN :

Kelas Benchrest 25 Meter : (Rp. 150.000)

Kelas PCP Tripose 33 Meter Metal Silhouette : (Rp. 150.000)

Kelas Uklik (Visir) Tripose 17 Meter Metal Silhouette : (Rp. 100.000)

Link Pendaftaran Melalui G-Form:

<https://forms.gle/6cPjrmQCxrxNY4Pg8>

Ruas Akhir Pendaftaran : Jumat, 6 Desember 2024

Rekening Tujuan : 3021153089
Nama Rekening Tujuan : SUMARNO

Informasi:

Anto (0852 4536 2344)

Marno Jagau's (0852 4556 5234)

DOORPRIZE
UNTUK PESERTA
DAN PENONTON



Pendaftaran
SCAN DISINI

